

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Setelah melakukan penelitian tentang persepsi pegawai terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di LKPP, maka simpulan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan penyerapan informasi Reformasi Birokrasi yang disampaikan *key informant*. Hal tersebut dikarenakan perbedaan memperoleh informasi tentang Reformasi Birokrasi. Informasi yang didapatkan oleh *key informant* terkait Reformasi Birokrasi didapatkan sebelum menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), ketika diangkat menjadi CPNS, sesudah dilantik menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), menjadi nara hubung atau Person In Charge (PIC) dari setiap unit kerja di LKPP, ataupun ketika menjadi Tim Reformasi Birokrasi LKPP.
2. Terdapat perbedaan pemahaman informasi Reformasi Birokrasi yang disampaikan oleh *key informant* untuk kedelapan area perubahan, yaitu dimulai dari area perubahan manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan organisasi, penataan tata laksana, penataan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, sampai dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Perbedaan pemahaman ini dikarenakan oleh adanya perbedaan penyerapan informasi, pengalaman, latar belakang, dan stimulus lainnya, sehingga menyebabkan terjadinya interpretasi yang berakibat pada perbedaan pemahaman dari setiap informan.
3. Terdapat perbedaan penilaian Reformasi Birokrasi yang disampaikan oleh *key informant*. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Reformasi Birokrasi untuk kedelapan area perubahan, yaitu dimulai dari area perubahan manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan organisasi, penataan tata laksana, penataan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, sampai dengan

peningkatan kualitas pelayanan publik. Telah dilakukan perbaikan secara terus-menerus dalam melaksanakan kedelapan area perubahan Reformasi Birokrasi, namun tetap diperlukan adanya strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan Reformasi Birokrasi di LKPP.

B. Saran

1. Untuk menyamakan informasi Reformasi Birokrasi yang berbeda-beda pada setiap pegawai, hendaknya dilakukan sosialisasi terkait Reformasi Birokrasi dilakukan untuk semua level pegawai, sehingga akan menimbulkan *awareness* dan keterlibatan semua pihak di LKPP dalam upaya melaksanakan kegiatan dalam rangka Reformasi Birokrasi.
2. Untuk meningkatkan kemampuan dalam memahami Reformasi Birokrasi perlunya dilakukan perbaikan secara terus-menerus dalam melaksanakan kedelapan area perubahan, terobosan-terobosan/inovasi, sosialisasi, internalisasi dalam rangka memperbaiki nilai Reformasi Birokrasi di LKPP sehingga menimbulkan kesadaran diri untuk setiap pegawai untuk terus belajar dan mempelajari tentang Reformasi Birokrasi sehingga pemahamannya sesuai dengan definisi atau ruang lingkup dari Reformasi Birokrasi itu sendiri beserta kedelapan area perubahannya.
3. Untuk meningkatkan penilaian Reformasi Birokrasi di LKPP, sebaiknya dilakukan strategi-strategi Reformasi Birokrasi di LKPP, diantaranya yaitu:
 - a. Secara umum yang berhubungan dengan manajemen hendaknya dilakukan:
 - 1) Adanya komitmen dan keterlibatan aktif dari semua pihak dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di LKPP dari pimpinan sampai dengan staf pelaksana.
 - 2) Adanya sosialisasi dan internalisasi terkait Reformasi Birokrasi kepada semua pegawai.
 - 3) Melakukan evaluasi kembali terhadap nilai Reformasi Birokrasi yang telah didapatkan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terutama di kedelapan area perubahan.

- 4) Diperlukan adanya penyamaan persepsi tentang definisi , ruang lingkup, dan tata cara penilaian Reformasi Birokrasi antara LKPP dengan KemenPAN RB sebagai penilai Reformasi Birokrasi.
 - 5) Diperlukan adanya dokumentasi dokumen untuk setiap kegiatan yang dilakukan dapat diintegrasikan pada sebuah aplikasi atau sistem
 - 6) Diperlukan adanya inovasi-inovasi yang terus dapat dilakukan dalam rangka memperbaiki pelaksanaan Reformasi Birokrasi di LKPP, diantaranya: menciptakan aplikasi informasi teknologi atau sistem aplikasi yang terintegrasi pada semua unit kerja di LKPP dan dapat diakses oleh semua unit kerja di LKPP.
- b. Area Manajemen Perubahan, hendaknya dilakukan:
- 1) Adanya Tim Manajemen Mutu Internal LKPP dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di LKPP dengan tujuan Tim tersebut bertugas untuk memastikan bahwa semua bagian/semua area perubahan yang terdapat di pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan proses dan persyaratan yang telah ditentukan oleh KemenPAN-RB.
 - 2) Adanya sinkronisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi dari setiap unit kerja yang ada di LKPP, dengan adanya rapat pembahasan untuk memaparkan rencana aksi setiap unit kerja dan mengelompokkan rencana aksi yang dapat diintegrasikan
 - 3) Adanya sistem aplikasi Reformasi Birokrasi yang didalamnya memuat rencana aksi dari setiap unit yang dapat dilihat dan diakses oleh semua unit kerja di LKPP
- c. Area Deregulasi Kebijakan, hendaknya dilakukan:
- 1) Disusunnya pohon regulasi disertai dengan formula penyusunan pohon regulasinya serta menetapkan sebagai panduan atau pedoman yang dapat digunakan oleh setiap unit kerja, agar dapat digunakan untuk memetakan regulasi/peraturan yang mana saja yang perlu untuk diintegrasikan, dihilangkan, atau mana saja peraturan atau regulasi yang tumpang tindih.

- 2) Disusunnya kode etik yang berlaku untuk semua pegawai di LKPP baik untuk PNS, CPNS, atau pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak/jasa lainnya.
- d. Area Penataan Organisasi, hendaknya dilakukan:
- 1) Dilakukan evaluasi ulang terhadap formasi penyetaraan jabatan yang sudah dilakukan.
 - 2) Merencanakan setiap Eselon 1 mempunyai kesekretariatan, sehingga setiap unit kerja Eselon 1 mempunyai tempat atau fasilitas untuk melaksanakan tugas pengadministrasian sehingga dokumentasi kegiatan lebih terorganisir.
- e. Area Penataan Tata Laksana, hendaknya dilakukan:
- 1) Adanya integrasi SOP di unit kerja-unit kerja di LKPP untuk kegiatan atau pekerjaan yang karakteristiknya sama, sehingga dapat digunakan secara Bersama.
 - 2) Adanya penetapan-penetapan SOP yang telah disusun dan telah divalidasi.
 - 3) Adanya sosialisasi SOP-SOP yang ada di LKPP kepada seluruh pegawai.
- f. Area Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur, hendaknya dilakukan:
- 1) Mulai diberlakukannya sistem merit bagi pegawai sehingga dapat dipastikan suatu jabatan tertentu diduduki oleh pegawai yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan dalam suatu jabatan.
 - 2) Adanya analisis kebutuhan untuk pengembangan kompetensi setiap pegawai, sehingga setiap pegawai sudah ada pohon pengembangan kompetensi yang harus dilakukan dan dapat melihat prioritas pelatihan apa yang dibutuhkan, sehingga dengan adanya keterbatasan anggaran tetap dapat memenuhi kebutuhan setiap pegawai untuk meningkatkan kompetensinya.

g. Area Penguatan Akuntabilitas

Adanya sistem aplikasi atau IT yang dapat memperlihatkan hasil pekerjaan setiap unit kerja yang dapat diakses oleh seluruh unit kerja di LKPP, seperti dibuatnya sistem aplikasi e-LAKIP LKPP yaitu sistem elektronik yang mengintegrasikan seluruh laporan akuntabilitas kinerja di seluruh unit kerja di LKPP.

h. Area Penguatan Pengawasan

Adanya inovasi-inovasi dalam memperkuat pelaksanaan pengawasan di LKPP seperti adanya sistem aplikasi atau IT yang dapat memperlihatkan hasil pengawasan internal setiap unit kerja yang dapat diakses oleh seluruh unit kerja di LKPP, seperti dibuatnya sistem aplikasi SIMWA (Sistem Pengawasan) LKPP yaitu sistem aplikasi yang mengintegrasikan pengawasan internal yang telah dilakukan oleh masing-masing unit kerja di LKPP.

i. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- 1) Adanya inovasi-inovasi dalam memperkuat pelaksanaan pelayanan publik di LKPP seperti adanya sistem aplikasi atau IT yang dapat diakses oleh seluruh unit kerja di LKPP dan dapat diakses oleh seluruh stakeholder, seperti dibuatnya aplikasi e-Portal PTSP LKPP yang berisi seluruh informasi dan fasilitasi pelayanan public yang terdapat di LKPP
- 2) Adanya sosialisasi standar pelayanan atau maklumat pelayanan dari setiap unit kerja di LKPP kepada seluruh pegawai, sehingga jika stakeholder membutuhkan informasi atau fasilitasi dari LKPP, semua pegawai aware terhadap pelayanan yang harus diberikan kepada setiap stakeholder.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Diah. 2016. *Bureaucratic Reform In The Empirical Perspective And Pathology*. Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
- Angkasah Lalu, Adolf Huala, dan Asikin Zainal. 2017. *Bureaucratic Reform in the Perspective of State Administration Law*. Mediterranean Journal of Social Sciences. Vol. 8, No.5.
- Arikunto. 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi III)*. Yogyakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Chandra, Leo Addy. 2013. *Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Kutai Barat*. Jurnal Administrasi Negara, 1(3) 2013: 885-889.
- Clampitt, Philip G dan Downs, Cal W. 1993. *Employee Perceptions of the Relationship Between Communication and Productivity: A Field Study*. The Journal of Business Communication. Vol 30, No.01.
- Fahurrahman. 2016. *Faktor Birokrasi dalam Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik*. Jurnal Tarbawi. Vo..2, No.02.
- Harisah, Afifah dan Masiming Zulfritra. 2008. *Persepsi Manusia terhadap Tanda, Simbol, dan Spasial*. Jurnal SMARTek. Vol.6, No.1.
- Hoag, Colin. 2011. *Assembling Partial Perspectives: Thoughts on the Anthropology of Bureaucracy*. Jurnal University of California, Santa Cruz.
- Hood, Christopher dan Lodge Martin. 2004. *Competency, Bureaucracy and Public Management Reform: A Comparative Analysis*. An International Journal of Policy, Administration, and Institutions, Oxford. Vol. 17, No. 3.
- Ikhwan, Afiful. 2017. *Kajian Sosio Historis Pendidikan Islam Indonesia Era Reformasi*. Vol.05, No.01.
- Johnston, Robert dan Heineke, Janelle. 1998. *Exploring the Relationship between Perception and Performance: Priorities for Action*. The Service Industries Journal, USA. Vol. 18. No. 1

- Kong, Eric dan Prior Daniel. 2007. *An Intellectual Capital Perspective of Competitive Advantage in Nonprofit Organisations*. International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing Int. J. Nonprofit Volunt. Sect. Mark, Australia. 13: 119–128.
- Muhamad. 2008. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moelong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moynihan, Donald P. 2016. *Normative and Instrumental Perspective On Public Participation*. Jurnal Texas A and M University.
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.
- Rewansyah, Asmawi. 2012. *Kepemimpinan dan Pelayanan Publik*. Jakarta: PT. Rizky Grafis.
- Rewansyah, Asmawi. 2012. *Reformasi Birokrasi dalam Rangka Good Governance*. Jakarta: PT. Rizky Grafis.
- Romli, Lili. 2008. *Masalah Reformasi Birokrasi*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS. Vol.2, No.2.
- Simbolon, Maropen. 2008. *Persepsi dan Kepribadian*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol.2, No.1.
- Sulaeman, Budiman. 2013. *Reformasi Pemikiran Hukum Islam*. Jurnal Hukum Diktum. Vol.11, No.2.
- Suradinata, Ermaya. 2015. *Reformasi Organisasi dan Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

Olivia, Tindas. Tanpa Tahun. Perilaku Birokrasi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Tomohon. [www.google scholar](http://www.google.scholar). (Diakses tanggal 25 Desember 2020).

Uma Sekaran. 2006. *Research Methods For Business Metode Penelitian untuk Bisnis*. Bandung: PT. Salemba Empat.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Wahjusaputri, Sintha dan Irawan, Bambang. 2019. *Bureaucratic Reform Policy Strategy Using The Cipp Model For The Improvement Of Public Services In Kemenko-Polhukam*. Jurnal Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Vol.3, No.1.

Walgito, Bimo. 2002. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset.

Yusuf, Muri. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Zainal Arifin. 2005. *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Pedoman Wawancara Penelitian
Analisis Persepsi Pegawai Terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1. Identitas Informan

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pendidikan Terakhir :
- d. Jabatan :
- e. Unit Kerja :

2. Pertanyaan Wawancara

a. Indikator Kemampuan untuk Menyerap Informasi tentang Reformasi Birokrasi

Apakah Bapak/Ibu pernah mendengar terkait dengan?

- 1) Definisi Umum Reformasi Birokrasi
- 2) Manajemen Perubahan
- 3) Deregulasi Kebijakan
- 4) Penataan Organisasi
- 5) Penataan Tata Laksana
- 6) Penataan Sumber Daya Manusia
- 7) Penguatan Akuntabilitas
- 8) Penguatan Pengawasan
- 9) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Jika pernah, dari manakah Bapak/Ibu mendengarkan istilah tersebut?

b. Indikator Kemampuan untuk Memahami tentang Reformasi Birokrasi

Menurut Bapak/Ibu apakah yang dimaksud dengan:

- 1) Definisi Umum Reformasi Birokrasi?
- 2) Manajemen Perubahan?
- 3) Deregulasi Kebijakan?
- 4) Penataan Organisasi?
- 5) Penataan Tata Laksana?
- 6) Penataan Sumber Daya Manusia?
- 7) Penguatan Akuntabilitas?
- 8) Penguatan Pengawasan?
- 9) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik?

c. Indikator Kemampuan untuk Menilai tentang Reformasi Birokrasi

Bagaimana menurut Bapak/Ibu terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di LKPP yang berkaitan dengan:

- 1) Manajemen Perubahan?
- 2) Deregulasi Kebijakan?
- 3) Penataan Organisasi?
- 4) Penataan Tata Laksana?
- 5) Penataan Sumber Daya Manusia?
- 6) Penguatan Akuntabilitas?
- 7) Penguatan Pengawasan?
- 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik?

Strategi apa yang seharusnya dilakukan oleh pegawai LKPP untuk mendukung perbaikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan LKPP?

Lampiran 2

Pedoman Observasi penelitian
Analisis Persepsi Pegawai Terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

No	Aspek-aspek yang Diamati	Keterangan
1	Pelaksanaan yang berkaitan dengan manajemen perubahan di LKPP	
2	Pelaksanaan yang berkaitan dengan deregulasi kebijakan di LKPP	
3	Pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan organisasi di LKPP	
4	Pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan tata laksana di LKPP	
5	Pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan SDM di LKPP	
6	Pelaksanaan yang berkaitan dengan penguatan akuntabilitas di LKPP	
7	Pelaksanaan yang berkaitan dengan penguatan pengawasan di LKPP	
8	Pelaksanaan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik di LKPP	

Lampiran 3

Pedoman Telaahan Dokumen
Analisis Persepsi Pegawai Terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

No	Area Perubahan	Dokumen
1	Pelaksanaan yang berkaitan dengan manajemen perubahan di LKPP	
2	Pelaksanaan yang berkaitan dengan deregulasi kebijakan di LKPP	
3	Pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan organisasi di LKPP	
4	Pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan tata laksana di LKPP	
5	Pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan SDM di LKPP	
6	Pelaksanaan yang berkaitan dengan penguatan akuntabilitas di LKPP	
7	Pelaksanaan yang berkaitan dengan penguatan pengawasan di LKPP	
8	Pelaksanaan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik di LKPP	

Sumber Informan

No	Nama	Jabatan	Kode Informan
1	Edi Kristyanto	Perencana Madya dan Koordinator di Biro Perencanaan dan Keuangan	KI 1.1
2	Cecep	Analisis Kebijakan Pertama Biro Perencanaan dan Keuangan	KI 1.2
3	Budi Bowo Laksono	Widyaiswara Pertama Pusdiklat PBJ	KI 1.3
4	Laila Mufarokhah	Analisis Kebijakan Muda dan Subkoordinator di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	KI 2.1
5	Inamawati Mastuti Dewi	Analisis Kebijakan Muda dan Subkoordinator di Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum	KI 2.2
6	Rizky Arimawati	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusdiklat PBJ	KI 2.3
7	Ermawanto	Perencana Muda Biro Perencanaan dan Keuangan	KI 2.4
8	Febrita Sidabolak	Perencana Muda dan Subkoordinator di Direktorat Pengembangan Sistem Katalog	KI 2.5
9	Hilman Fazri	Analisis Kebijakan Muda dan Subkoordinator di Direktorat Pengembangan Sistem Katalog	KI 2.6

10	Muhamad Irsan Nasution	Arsiparis Muda dan Subkoordinator di Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi, dan Umum	KI 2.7
11	Yosi Febriani	Wisyaaiswara Pertama Pusdiklat PBJ	KI 3.1
12	Yoga Nurdani	Analisis Sistem Informasi Subbagian Tata Usaha Pusdiklat PBJ	KI 3.2
13	Setiaji Santoso	Analisis Diklat Pusdiklat PBJ	KI 3.3
14	Yohanes Chrisostomus C.P	Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Inspektorat	KI 3.4

POLITEKNIK
STIA LAN
 J A K A R T A

Transkrip Wawancara Penelitian Informan KI 1.1
Analisis Persepsi Pegawai Terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

1. Informan

- a. Nama : Edi Kristiyanto
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Pendidikan Terakhir : S-1
- d. Jabatan : Perencana Madya dan Koordinator di Biro Perencanaan dan Keuangan
- e. Unit Kerja : Biro Program dan Keuangan (BPK)
- f. Hari, tanggal : Kamis, 8 April 2021
- g. Waktu : 15.00-16.00 WIB

2. Wawancara

Pertanyaan	Jawaban
Assalamuálaikum, terima kasih sudah bersedia menjadi informan dalam Penelitian saya dalam rangka penyusunan tesis. Penelitian saya berjudul	Waálaikumussalam

Pertanyaan	Jawaban
“Analisis Persepsi Pegawai terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di LKPP” yang akan membahas terkait delapan area perubahan dan pada wawancara ini terkait persepsi yang menyangkut bagaimana mendapatkan informasinya, pemahamannya, dan penilaiannya.	
1. Definisi Reformasi Birokrasi	
Pernahkah mendengar istilah Reformasi Birokrasi? Bolehkah menceritakan lebih detail?	Karena saya terlibat di LKPP terkait Reformasi Birokrasi karena di tugaskan sebagai Tim Reformasi Birokrasi sekitar tahun 2013 masih di Deputi 4, dari awal PNS belum aware juga karena mutasi dari Kementerian Kehutanan mulai tahun 1999 karena dibidang pengadaan
Berdasarkan pemahaman, apa yang dimaksud dengan Reformasi Birokrasi?	Upaya LKPP untuk mencapai tata Kelola pemerintahan dari aspek-aspek organisasi yaitu 8 area perubahan, melakukan pembaharuan atau perbaikan
2. Manajemen Perubahan	
Pernahkah mendengar istilah tentang manajemen perubahan?	Karena saya terlibat di LKPP terkait Reformasi Birokrasi karena di tugaskan sebagai Tim Reformasi Birokrasi sekitar tahun 2013

Pertanyaan	Jawaban
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan manajemen perubahan itu seperti apa?	Manajemen perubahan intinya perbaikan-perbaikan atau pembaharuan-pembaharuan
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Implementasi di LKPP membentuk Tim Reformasi Birokrasi, Menyusun road map, dan juga kaya ada agen perubahan itu bagian dari manajemen perubahan. Pendapat saya dari tahun ke tahun pelaksanaannya selalu meningkat, dulu belum ada road map sekarang ada, semua kita libatkan ke semua unit, membangun awareness bahwa Reformasi Birokrasi bukan tugas dari Sestama, di area ini sudah ada peningkatan, mungkin belum mencapai kondisi ideal.
3. Deregulasi Kebijakan	
Pernahkah mendengar tentang deregulasi kebijakan?	Karena saya terlibat di LKPP terkait Reformasi Birokrasi karena di tugaskan sebagai Tim Reformasi Birokrasi sekitar tahun 2013
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan deregulasi kebijakan itu seperti apa?	Deregulasi intinya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada di LKPP
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Misal di bagian Hukum memberi kesempatan kepada unit-unit organisasi mana peraturan yang berbentrok atau belum ada atau belum mendukung. Sekarang penyusunannya semakin bagus, sevelum bikin

Pertanyaan	Jawaban
	kebijakan harus ada naskah akademis, kemudian diuji di aturan LAN IKK (Indeks Kualitas Kebijakan) baru ada untuk level Perpres, sudah ada kemajuan. Diminta melakukan self assessment, pengajuan ke LAN, nanti LAN akan memberikan nilai IKK-nya berapa. Perpres LKPP IKK-nya kategorinya sedang, penilaiannya banyak variabel-variabelnya
4. Penataan Organisasi	
Pernahkah mendengar istilah tentang penataan organisasi?	Karena saya terlibat di LKPP terkait Reformasi Birokrasi karena di tugaskan sebagai Tim Reformasi Birokrasi sekitar tahun 2013
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan manajemen perubahan itu seperti apa?	Penyederhanaan organisasi dan penyetaraan jabatan
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Lebih ke cara cepat merespon arahan Presiden dengan menghilangkan eselon 3 dan eselon 4, sudah melantik para jabatan fungsional. Dampaknya mungkin konteksnya bukan di ranah Reformasi Birokrasi, tetapi belum dilakukannya evaluasi keefektifannya karena baru diangkat
5. Penataan Tata Laksana	
Pernahkah mendengar istilah tentang penataan	Karena saya terlibat di LKPP terkait Reformasi Birokrasi karena di

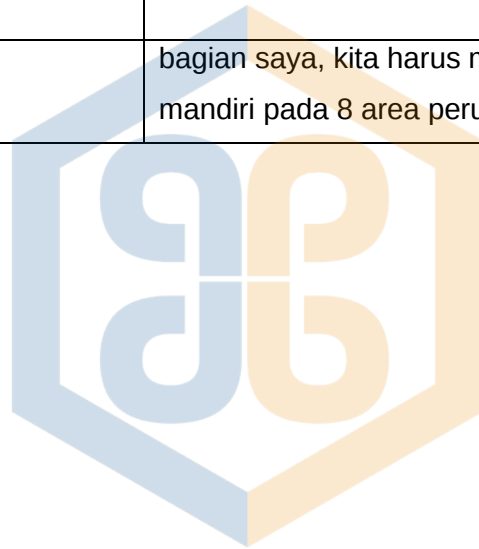
Pertanyaan	Jawaban
tata laksana?	tugaskan sebagai Tim Reformasi Birokrasi sekitar tahun 2013
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan penataan tata laksana itu seperti apa?	-
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Tata laksana LKPP sekarang sudah cukup masif, idealnya suatu organisasi harus punya proses bisnis. LKPP sedang Menyusun proses bisnis sesuai dengan kaidah-kaidah dari MenPAN mencoba meta bisnisnya, karena memang ada terkait dengan pengaturan organisasi dalam membuat proses bisnis.
6. Penataan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	
Pernahkah mendengar istilah tentang penataan SDM Aparatur?	Karena saya terlibat di LKPP terkait Reformasi Birokrasi karena di tugaskan sebagai Tim Reformasi Birokrasi sekitar tahun 2013
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan SDM Aparatur itu seperti apa?	Lebih ke peningkatan kompetensi
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Ini domainnya di teman-teman kepegawaian, sudah mewajibkan setiap PNS dalam 1 tahun dikursuskan atau ditingkatkan kompetensinya walau

Pertanyaan	Jawaban
	implementasinya tidak mudah, tapi upaya-upaya ke sana sudah ada misalnya dengan in house training, tugas belajar, tinggal ditingkatkan transparansi dan kekonsistennannya. Tiap ASN wajib 20 JP setahun sebetulnya bagus tapi implementasinya kurang merta, dapat dipahami karena keterbatasan anggaran. Tetapi tidak terbatas ke palatihan saja tapi adanya promosi jabatan, kode etik pegawai
7. Penguatan Akuntabilitas	
Pernahkah mendengar istilah tentang penguatan akuntabilitas?	Karena saya terlibat di LKPP terkait Reformasi Birokrasi karena di tugaskan sebagai Tim Reformasi Birokrasi sekitar tahun 2013
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan penguatan akuntabilitas itu seperti apa?	Capaian kinerja
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Sekarang itu, setiap pimpinan di setiap level harus terlibat dalam penyusunan renstra, karena melibatkan semua level atau jenjang jabatan. Setiap unit organisasi harus aware terhadap isi renstranya karena harus tahu cara menghitung rumusnya berapa capaian kinerjanya, kemudian yang berikutnya setiap bulan harus melaporkan progresnya, perbaikannya meningkat. Capaian fisik sekarang dihitung

Pertanyaan	Jawaban
	dalam capaian Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan RO
8. Penguatan Pengawasan	
Pernahkah mendengar istilah tentang penguatan pengawasan?	Karena saya terlibat di LKPP terkait Reformasi Birokrasi karena di tugaskan sebagai Tim Reformasi Birokrasi sekitar tahun 2013
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan penguatan pengawasan itu seperti apa?	Kaitannya dengan Inspektorat, tetapi sebetulnya tidak hanya Inspektorat tapi sudah <i>Whistle Blowing System (WBS)</i>
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Inspektorat sudah membuat peta resiko, pelaporan gratifikasi
9. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
Pernahkah mendengar istilah tentang peningkatan kualitas pelayanan publik?	Karena saya terlibat di LKPP terkait Reformasi Birokrasi karena di tugaskan sebagai Tim Reformasi Birokrasi sekitar tahun 2013
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan peningkatan kualitas pelayanan publik itu seperti apa?	Setiap Lembaga atau Kementerian selalu berhubungan dengan layana publik
Bagaimana penilaiannya terhadap	Layanan itu tidak standar, tetapi di LKPP sudah melakukan standar

Pertanyaan	Jawaban
pelaksanaannya di LKPP?	pelayanan dengan adanya Standar Pelayanan Publik, sudah memberikan pelatihan service excellent, sudah memberikan pelayanan terpadu, mencoba memanfaatkan teknologi informasi, ada aplikasi-aplikasi itu merupakan inovasi dari peningkatan pelayanan publik
10. Strategi apa yang seharusnya dilakukan oleh pegawai LKPP untuk mendukung perbaikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan LKPP?	Kalau peringkatnya baik, kita bisa mempertahankan BB di bawah A, seperti A-, dari 2016 ke tahun 2020 kita sellau BB, tetapi selalu tercapai dari target. Memang tidak mudah dalam melakukan 8 area perubahan karena yang menilai adalah MenPAN, dibutuhkan komitmen, ini yang belum dipahami, karena pekerjaan harus ada buktinya itu kadang kesulitan, PIC Reformasi Birokrasi kadang tidak fokus karena banyak juga mengerjakan hal teknis juga, mungkin di bagian itu yang agak sulit, terkadang penilaian mandiri besar, ketika penilaian dari MenPAN berbeda walau sudah berusaha semaksimal mungkin. Penilaian RB berhubungan dengan bukti dukung. Renstra adalah target dan tujuan 5 tahun ke depan itu kan juga strategi, komitmen pimpinan sebetulnya sudah melekat ke Beliau-beliau sellau diingatkan juga pada rapat pimpinan, kalau saya sebagai individu berkoordinasi dengan tim saya untuk aware dengan tugas-tugas di

Pertanyaan	Jawaban
	bagian saya, kita harus membantu pada saat tim melakukan penilaian mandiri pada 8 area perubahan tersebut.



POLITEKNIK
STIA LAN
 J A K A R T A

Transkrip Wawancara Penelitian Informan KI 1.2
Analisis Persepsi Pegawai Terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1. Informan

- a. Nama : Cecep Hendar
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Pendidikan Terakhir : S-1
- d. Jabatan : Analis Kebijakan Pertama Biro Perencanaan dan Keuangan
- e. Unit Kerja : Biro Program dan Keuangan
- f. Hari, tanggal : Senin, 12 Maret 2021
- g. Waktu : 12.00-13.00 WIB

2. Wawancara

Pertanyaan	Jawaban
Assalamuálaikum, terima kasih sudah bersedia menjadi informan dalam Penelitian saya dalam rangka penyusunan tesis. Penelitian saya berjudul "Analisis Persepsi Pegawai terhadap Pelaksanaan	Waálaikumussalam

Pertanyaan	Jawaban
Reformasi Birokrasi di LKPP”yang akan membahas terkait delapan area perubahan dan pada wawancara ini terkait persepsi yang menyangkut bagaimana mendapatkan informasinya, pemahamannya, dan penilaiannya.	
1. Definisi Reformasi Birokrasi	
Pernahkah mendengar istilah Reformasi Birokrasi?Bolehkah menceritakan lebih detail?	Kalau denger Reformasi Birokrasi sudah lama sejak jaman Susilo Bambang Yudoyono (SBY), saya CPNS 2015, dulu kerja di pemerintahan dulu tapi belum PNS tahun 2010
Berdasarkan pemahaman, apa yang dimaksud dengan Reformasi Birokrasi?	Reformasi Birokrasi sebetulnya merubah paradigma bahwa PNS tugas utamanya melakukan pelayanan publik kepada masyarakat
2. Manajemen Perubahan	
Pernahkah mendengar istilah tentang manajemen perubahan?	Baru tahu setelah jadi PNS tahun 2016, tahu ketika isi kuesioner dari MenPAN RB
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan manajemen perubahan itu seperti apa?	Perubahan pola pikir untuk memperbaiki manajemen secara sistematis
Bagaimana penilaiannya terhadap	Berkaitan dengan budaya kerja yang telah ditetapkan di LKPP

Pertanyaan	Jawaban
pelaksanaannya di LKPP?	
3. Deregulasi Kebijakan	
Pernahkah mendengar tentang deregulasi kebijakan?	Pernah dilatih untuk bagaimana disuruh membuat kebijakan tahun 2015
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan deregulasi kebijakan itu seperti apa?	Penyederhanaan kebijakan atau pengurangan
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Di Renstra di LKPP, perubahan Perpres PBJ. Contohnya Permen PUPR mengatur tentang pengadaan pekerjaan konstruksi, sekarang sudah diatur di Perpres 12 Tahun 2021 dan turunannya sehingga Permen PUPR yang mengatur PBJ dicabut
4. Penataan Organisasi	
Pernahkah mendengar istilah tentang penataan organisasi?	Sudah pernah dengarr sejak jadi CPNS
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan manajemen perubahan itu seperti apa?	Berkaitan dengan penataan organisasi di suatu instansi

Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Penyetaraan jabatan fungsional
5. Penataan Tata Laksana	
Pernahkah mendengar istilah tentang penataan tata laksana?	Sudah pernah dengarr sejak jadi CPNS
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan penataan tata laksana itu seperti apa?	Berkaitan dengan prosedur kerja contohnya SOP
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Yang sudah diterapkan adalah SOP-SOP, sehingga ketika ada rotasi dan muncul orang-orang baru, dengan adanya SOP akan mengetahui tahapan dalam pekerjaannya atau kegiatan siapa pun orangnya
6. Penataan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	
Pernahkah mendengar istilah tentang penataan SDM Aparatur?	Dari dulu sudah pernah dengar sebelum jadi CPNS
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud	Berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi SDM

Pertanyaan	Jawaban
dengan SDM Aparatur itu seperti apa?	
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Di LKPP menuju ke arah penguatan SDM sebetulnya, kalo dilihat dari anggaran di masing-masing uke II dari anggaran masing-masing UKE 2, kita tuh lembaga kebijakan tapi kita belum ada standar kualifikasi pegawai yang kerja di kita apa yang harus kualifikasi, kalo sekarang kualifikasi sesuai dengan kualifikasi jabatan fungsional, kita belum ada pola pembinaan terkait pengadaan barang/jasa, kalo tidak jadi pelaku pengadaan pasti gak tau tentang pengadaan barang/jasa. Misalkan CPNS punya jangka waktu dalam 2 tahun diajarkan tentang PBJP tingkat dasar, seharusnya dari sesudah pbjp tingkat dasar, seharusnya ada pola misalnya jadi pokja di magangkan di unit kerja mana, sehingga mempunyai pengalaman pengadaan yang sama, dan di program dari bagian SDM.
7. Penguatan Akuntabilitas	
Pernahkah mendengar istilah tentang penguatan akuntabilitas?	Ketika jadi Tim RB
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud	Merupakan salah satu prinsip pengadaan

Pertanyaan	Jawaban
dengan penguatan akuntabilitas itu seperti apa?	
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	LKPP membuat tools-tools dalam pengadaan barang/jasa seperti monev, SiRUP. Kadang lucu, kadang 100% kadang lebih dari 100%. Dari sisi keretbukaan juga sudah menggunakan banyak kanal seperti medsos dan lainnya untuk melakukan transparansi kinerja LKPP kepada masyarakat.
8. Penguatan Pengawasan	
Pernahkah mendengar istilah tentang penguatan pengawasan?	Sudah dengar dari sejak dulu
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan penguatan pengawasan itu seperti apa?	Kaitannya dengan Inspektorat
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Apa yang dilakukan di Biro Perencanaan melakukan evaluasi yang komprehensif itu merupakan kemajuan yang sudah sangat terlihat jelas, dan dilakukan oleh Inspektorat, walaupun repot tapi memang sangat dibutuhkan
9. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
Pernahkah mendengar istilah tentang	Sering dengar

Pertanyaan	Jawaban
peningkatan kualitas pelayanan publik?	
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan peningkatan kualitas pelayanan publik itu seperti apa?	Berkaitan dengan pelayanan yang diberikan ke masyarakat
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Pelayanan publik di LKPP di lantai M belum dikelola dengan baik, silakan dicoba sama Mbak Hestri kalo nelfon ke LKPP diangkat oleh siapa. Waktu itu belum dibuat SOP dalam menangani konsultasi, sehingga sama siapa saja ditangani walau belum ada pengalaman di bidang pengadaan, masalah utamanya ada di SDM
10. Strategi apa yang seharusnya dilakukan oleh pegawai LKPP untuk mendukung perbaikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan LKPP?	Nilai RB merupakan nilai dari keseluruhan, harus dilihat satu-satu dibagian mana atau area mana yang masih kecil, nilai kenaikan belum signifikan mungkin pada waktu itu ada diposisi titik jenuh belum cukup rotasi pegawai/pejabat tahun 2018, kalau terlalu lama bisa jadi sudah nyaman, dan mungkin inovasinya tidak banyak. Strategi dari sisi LKPP harus dikembalikan ke Renstra untuk melihat tujuan baru ke SDM, ketika kita sudah paham dengan tujuan kita, maka

Pertanyaan	Jawaban
	kita kan lebih mudak mengimplementasikannya ke dalam kegiatan-kegiatan, diperlukan proses internalisasi, sekarang sudah <i>aware</i> tentang renstra, terutama diperlukan penguatan SDM. Dengan adanya RB kita juga akan punya titik temu apa yang harus dikumpulkan. Dari sisi organisasi sudah disiapkan, walau bagian teknis jadi lebih repot, maunya ada di TU yang mengerjakan bagian kesekretariatan, karena menghasilkan Renstra yang disusun secara bersama-sama, sedangkan dari sisi pribadi kita harus ada sifat saling melayani dan saling support. Mungkin suatu saat saya butuh responden, pasti berkoordinasi dengan yang lain, ada banyak hal di luar organisasi yang berkembang, artinya sebagai individu membuat pola pikir yang berbeda. Saya ingat dulu di IUKI yang tidak berhubungan dengan pengadaan misal rapat terkait asosiasi apa, tapi di situ saya dapat mengenal penyedia apa-apa dan K/L lain, Bahwa banyak hal yang pada akhirnya mensupport, bersifat terbuka dengan siapa saja untuk memperkaya.

Transkrip Wawancara Penelitian Informan KI 1.3
Analisis Persepsi Pegawai Terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1. Informan

- a. Nama : Budi Bowo Laksono
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Pendidikan Terakhir : S-2
- d. Jabatan : Widyaiswara Pertama
- e. Unit Kerja : Pusdiklat PBJ
- f. Hari, tanggal : Selasa, 6 April 2021
- g. Waktu : 09.00-10.00 WIB

2. Wawancara

Pertanyaan	Jawaban
Assalamuálaikum, terima kasih sudah bersedia menjadi informan dalam Penelitian saya dalam rangka penyusunan tesis. Penelitian saya berjudul "Analisis Persepsi Pegawai terhadap Pelaksanaan	Waálaikumussalam

Pertanyaan	Jawaban
Reformasi Birokrasi di LKPP”yang akan membahas terkait delapan area perubahan dan pada wawancara ini terkait persepsi yang menyangkut bagaimana mendapatkan informasinya, pemahamannya, dan penilaiannya.	
1. Definisi Reformasi Birokrasi	
Pernakah mendengar istilah Reformasi Birokrasi?Bolehkah menceritakan lebih detail?	Sudah di LKPP 3 tahun, sudah pernah anggota Tim RB tahun 2019 dan 2020. Pernah dengar dari jaman kuliah karena sudah menjadi jargon dari pemerintahan dan kebetulan Bapak saya PNS di Pertahanan Nasional, dan karen adulu kuliah di FISIP terkait dengan kebijakan sudah digaung-gaungkan tentang Reformasi Birokrasi tahun anatar 2010 atau 2011
Berdasarkan pemahaman, apa yang dimaksud dengan Reformasi Birokrasi?	Simplifikasi birokrasi dalam pelayanan public, karena kan sebenarnya pernah belajar tentang organisasi tidak hanya terkotak-kotak organisasi itu, jadi suka berkaitannya dengan reorganisasi, simplikasai dari organisasi
2. Manajemen Perubahan	
Pernakah mendengar istilah tentang	Pernah dengar pas sejak kuliah tetapi masih pemahaman awamnya

Pertanyaan	Jawaban
manajemen perubahan?	
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan manajemen perubahan itu seperti apa?	Perubahan apakah organisasinya, SOP-nya, proses bisnisnya
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	LKPP selalu update terkait SOP terutama Pusdiklat tahun 2019 ISO itu berkaitan dengan manajemen mutu, jadi terasa sekali yang berhubungan dengan Pusdiklat, cukup cepat beradaptasi terhadap perubahan-perubahan, terus menganalisa, terus mengevaluasi dari internal, bagaimana kaitannya dengan resiko, setiap langkah dalam SOP di evaluasi dengan terus menerus. Kekurangannya sering kali incidental, SOP harus ada road map-nya, planingnya harusih
3. Deregulasi Kebijakan	
Pernahkah mendengar tentang deregulasi kebijakan?	Dengar sejak jaman kuliah, pernah dengar evaluasi kebijakan, terutama ditempel di skripsinya juga di Bab II merupakan flow cycle dari perumusan kebijakan
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan deregulasi kebijakan itu seperti apa?	Pastinya terkaaitan dengan bagaimana kebijkaan itu direviu, dan dievaluasi baru melakukan amandemen tujuannya untuk menilai mana-mana yang masih kurang
Bagaimana penilaiannya terhadap	Sekarang lagi deregulasi kebijakann perubahan perpres 16 athun 2018

Pertanyaan	Jawaban
pelaksanaannya di LKPP?	dan perlem-perlem turunannya, minimal 90 hari harus jadi semenjak perpresnya terbit. Langkahnya cepet langsung dibikin Tim dan langsung dibahas. Hambatannya berbentrok dengan atauran dari bidang lain. Deputi kebijakan sudah ada ketua tim, dari ketua tim tidak buntu, alhamdulillah di <i>marketplace</i> sudah jadi biasa dibahas dengan Kumham. Jika banyak terjadi ketidaksepakatan, diambil keputusan yang paling mendekati walaupun tidak 100% mirip dengan cantolannya dan kesepakatan dari tim.
4. Penataan Organisasi	
Pernahkah mendengar istilah tentang penataan organisasi?	Pernah , yang berubah banget ada di sestama dengar tahun 2008 ketika S-1
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan penataan organisasi itu seperti apa?	Berhubungan dengan reorganisasi
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Banyak terjadi perubahan di Sestama, LKPP termasuk yang fast respon terhadap arahan Presiden langsung dihilangkan eselon 3 dan 4, mungkin juga LKPP termasuk organisasi yang kecil. Kekurangannya banyak kendala, penelenggara pelatihan itu tidak ada jabfungsnya, harus

Pertanyaan	Jawaban
	dievaluasi lagi dihubungkan dengan bisnis prosesnya
5. Penataan Tata Laksana	
Pernahkah mendengar istilah tentang penataan tata laksana?	Pernah dengar
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan penataan tata laksana itu seperti apa?	Tata laksana berkaitan dengan SOP atau <i>job function</i> , kaitannya tidak terjadi pada instansi pemerintah dan terkait dengan risikony
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	SOP sudah terintegrasi, tetapi implementasinya belum maksimal, masih banyak berdiri sendiri-sendiri belum treintegrasi antara koordinator dengan koordinator lain
6. Penataan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	
Pernahkah mendengar istilah tentang penataan SDM Aparatur?	Pernah dengar sejak jaman SMA tahun 2004 dan ibu kebetulan jadi <i>general manager</i> di salah satu BUMN
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan SDM Aparatur itu seperti apa?	Konteksnya luas bisa dilihat dari formasi, masing-masing apa aja tugasnya, kualifikasi pekerjaannya, <i>people development</i> , SDM

Pertanyaan	Jawaban
	merupakan aset dari organisasi itu sendiri
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Walaupun baru 3 tahun tapi sudah banyak mendapatkan pelatihan-pelatihan, to' sudah dapet juga, pelatihan <i>public speaking</i> , pelatihan manajemen keuangan, dapat banyak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Kekurangannya dari segi waktu karena berbenturan dengan kerjaan sehari-hari. Trainingnya bisa dilakukan di luar jam kantor
7. Penguatan Akuntabilitas	
Pernahkah mendengar istilah tentang penguatan akuntabilitas?	Pernah dengar dari awal kerja tahun 2013
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan penguatan akuntabilitas itu seperti apa?	Berbicara tentang bagaimana caranya terkait tentang integritas, apalagi saya dulu sebagai akuntan harus bisa laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, bisa juga dari budaya kerjanya, bisa masuk ke <i>soft competency</i> nya
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Renstra LKPP sudah tercapai tersusun, karena sudah ada outputnya seperti apa untuk mencapai <i>output-output</i> tersebut. Karyawan LKPP integritasnya sudah bagus-bagus

Pertanyaan	Jawaban
8. Penguatan Pengawasan	
Pernahkah mendengar istilah tentang penguatan pengawasan?	Sering dengar, pernah dengar dari kuliah S-1
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan penguatan pengawasan itu seperti apa?	Karena terkiat dengan pengawasan control internal
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Inspektorat LKPP <i>head to head</i> dengan bagian keuangan sebagian besarnya, yang saya rasakan terkait LHKASN. Penguatan penngawasan terlihat banget drai segi absesi dari sisi langsung belum terasa lebih langsung
9. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
Pernahkah mendengar istilah tentang peningkatan kualitas pelayanan publik?	Sering dengar, dari dulu sebelum jadi PNS berkaitan dengan pelayan publik karena perusahaan berkaitan dengan jasa
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan peningkatan kualitas pelayanan publik itu seperti apa?	Memberikan pelayanan kepada masyarakat

Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Sudah diterapkan dalam pelatihan yang sudah mempergunakan model e-learning, ada akreditasi, pelayanan ke fasilitator, kalo dari unit, layanan pelayanan sengketa, saksi ahli dari Deputi 4, layanan sertifikat, layanan jabfung, maturitas UKPBJ, LPSE, SPSE, layanan konsultasi, dari sestama ke layanan internal LKPP
10. Strategi apa yang seharusnya dilakukan oleh pegawai LKPP untuk mendukung perbaikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan LKPP?	Penyebabnya berarti ada yang belum optimal, belum ada kajian terhadap nilai Reformasi Birokrasi, misal kenapa ada fluktuasi. RB hanya sebagai pekerjaan utama, belum menjadi issue strategis, mungkin dari perencanaannya dibuat road map tersendiri bisa 5 tahunan. Harus sering-sering diinternalisasi dari konsep RB itu sendiri. PR dari BHOSDM bagaimana Rb disosialisasi, bukan sesuatu mandatory yang diamanatkan dari MenPAN RB tapi bisa jadi baseline untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik salah satunya dengan <i>middle button up</i> , RB jadi <i>issue strategis</i>

Transkrip Wawancara Penelitian Informan KI 1.2
Analisis Persepsi Pegawai Terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1. Informan

- a. Nama : Laila Mufarokah
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. Pendidikan Terakhir : S-1
- d. Jabatan : Analais Kebijakan Mudan dan Subkoordinator di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
- e. Unit Kerja : Direktorat Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
- f. Hari, tanggal : Sabtu, 10 April 2021
- g. Waktu : 09.00-10.00 WIB

2. Wawancara

Pertanyaan	Jawaban
Assalamuálaikum, terima kasih sudah bersedia menjadi informan dalam Penelitian saya dalam rangka penyusunan tesis. Penelitian saya berjudul “Analisis Persepsi Pegawai terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di LKPP” yang akan membahas	Waálaikumussalam, iya gimana Teh

Pertanyaan	Jawaban
terkait delapan area perubahan dan pada wawancara ini terkait persepsi yang menyangkut bagaimana mendapatkan informasinya, pemahamannya, dan penilaiannya.	
1. Definisi Reformasi Birokrasi	
Pernahkah mendengar istilah Reformasi Birokrasi?Bolehkah menceritakan lebih detail?	Kalo misalkan terkait Reformasi Birokrasi tahun-tahun awal di LKPP belum memahami, tapi dulu pernah menjadi Tim Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2016, lewat dari 3 tahun semenjak jadi CPNS, sempet jadi <i>Person In Charge (PIC)</i> di salah satu area perubahan di Penataan Tata Laksana atau Deregulasi Kebijakan sudah agak lupa
Berdasarkan pemahaman, apa yang dimaksud dengan Reformasi Birokrasi?	Adanya RB MenPAN berupaya memperbaiki di sisi mana saja yang harus diubah di birokrasi pemerintahan, dengan adanya area perubahan instansi pemerintah dapat menilai memerlukan perubahan di aspek mana saja
2. Manajemen Perubahan	
Pernahkah mendengar istilah tentang manajemen perubahan?	Ketika menjadi Tim RB tahun 2016, dijelaskan ada 8 area, bukti dukungnya apa saja, kemudian dulu ada <i>Focus Group Discussion (FGD)</i>

Pertanyaan	Jawaban
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan manajemen perubahan itu seperti apa?	Tidak terlalu ingat karena sudah agak lama, merubah birokrasi yang sudah using, atau sistematika kerja yang lama menjadi diusulkan menjadi usulan baru sehingga lebih efisien dan efektif
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Di LKPP ada agen perubahan di tiap-tiap unit kerja, agen perubahan juga mempunyai rencana aksi perubahan. Manajemen perubahan tidak bisa langsung, perlu adanya adaptasi, kalo perubahan terkait dengan system dulu belum ada eoffice sekarang sudah ada eoffice, itu perubahan yang adapat dengan mudah terlihat
3. Deregulasi Kebijakan	
Pernahkah mendengar tentang deregulasi kebijakan?	Ketika menjadi Tim RB tahun 2016
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan deregulasi kebijakan itu seperti apa?	Memang pas dengan tugas sekarang, dulu bukan deregulasi, tapi peningkatan peraturan perundang-undangan
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Yang mengampunya D.1.1 meningkatkan tata peraturan perundangan-undangan. Sebetulnya inline dengan kegiatan saat ini yang sedang dikerjakan, berupaya mengurangi regulasi-regulasi. Pada saat sekarang barupaya mengurangi peraturan LKPP menjadi sedikit, contoh dulu

Pertanyaan	Jawaban
	katalog elektronik dan toko daring sekarang peraturan disatukan. Kalo terkait dengan peraturan banyak, bukannya banyaknya itu, tapi peraturan di LKPP ada banyak peraturan, tapi sebenarnya peraturan itu memang diperlukan. Jadi kondisinya posisi jika ada peraturan yang ada dihapus dijadikan satu, substansinya sama saja, tetapi mengidentifikasi jika ada inkonsistensi dijadikan jadi satu, dan sudah efektif
4. Penataan Organisasi	
Pernahkah mendengar istilah tentang penataan organisasi?	Ketika menjadi Tim RB tahun 2016
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan penataan organisasi itu seperti apa?	Sebenarnya organisasi berhubungan dengan Sumber Daya Manusia (SDM)
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Rotasi bisa acak, jika SDM ada disuatu tempat tertentu diperlukan peningkatan kompetensi tertentu, sekarang sebagian besar dihilangkan eselon 3 dan 4, kemudian jabatan fungsional. Kondisinya sekarang masih efektif tidak efektif karena jabatan fungsional masih menjadi koordinator dan subkoordinator. Padahal jabatan fungsional lebih ke keahlian, lingkungan kerja di LKPP belum tercipta fungsi-fungsinya untuk

Pertanyaan	Jawaban
	jabatan fungsional. Kalau dulu structural sudah efektif, sedangkan sekarang jabfung sekarang masih mengerjakan tugas kestrukturalan, padahal jabfung itu lebih ke keahlian.
5. Penataan Tata Laksana	
Pernahkah mendengar istilah tentang penataan tata laksana?	Ketika menjadi Tim RB tahun 2016
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan penataan tata laksana itu seperti apa?	Berhubungan dengan kualitas pelayanan publik, tapi ini lebih ke arah SOP-SOP
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Di LKPP, menyusunnya SOP waktu di D.1.2 menyusun SOP Pelayanan, kalau Menyusun SOP ke luar sudah efektif, tetapi SOP internal belum efektif, malah yang kita tidak bisa diprediksi yang internal, misalkan tentang persuratan saja seharusnya ada SOP bagaimana persurat dari unit kerja eselon 2 ke unit kerja eselon 2 lainnya prosesnya seperti apa, kemudian pembutan Surat Tugas ke Kepala LKPP belum ada. Tidak cukup ada eoffice tapi dibutuhkan ada SOPnya juga misalnya Kepala LKPP akan bersurat ke Menteri sebetulnya bagaimana, siapa yang mengantarkannya, bagian tata usahakah, bagian sekretaris Kepala LKPP

Pertanyaan	Jawaban
	kah, karena tidak jelas maka tergantung disposisi yang diberikan Kepala LKPP ke unit teknis yang diberi disposisi
6. Penataan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	
Pernahkah mendengar istilah tentang penataan SDM Aparatur?	Ketika menjadi Tim RB tahun 2016
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan SDM Aparatur itu seperti apa?	Berhubungan dengan peningkatan kompetensi
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Peningkatan kompetensi jabfung inline dengan tugas fungsi LKPP, namun pengembangan kompetensi atau fungsi-fungsi organisasi itu belum efektif. Terkait kondisi kerjanya saat ini belum efektif, menurut saya itu harus dipikirkan oleh kepegawaian juga, misal sebetulnya kita butuh penyusun rancangan (suncang), tapi di LKPP jabfung suncang belum ada baru ada analis kebijakan, jadi banyak pekerjaan yang dilakukan seharusnya menjadi angka kredit suncang, tetapi tidak dapat dihitung untuk angka kredit jabfung analis kebijakan

Pertanyaan	Jawaban
7. Penguatan Akuntabilitas	
Pernahkah mendengar istilah tentang penguatan akuntabilitas?	Ketika menjadi Tim RB tahun 2016
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan penguatan akuntabilitas itu seperti apa?	Terkait pertanggungjawaban baik dari Tindakan, dari kebijakannya, maupun dari personil
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Peraturan perundang-undangan berarti kita lebih ada data-data yang dapat kita pertanggungjawabkan, data permasalahan, wewenang atasan, kebijakan dari atasan. Kalo kegiatan juga misal keuangan juga harus mematuhi sesuai peraturan dari kementerian Keuangan. Penguatan tahapan
8. Penguatan Pengawasan	
Pernahkah mendengar istilah tentang penguatan pengawasan?	Ketika menjadi Tim RB tahun 2016
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan penguatan pengawasan itu seperti apa?	Pengawasan intern kurang begitu memahami, tapi ketika menyusun kebijakan Inspektorat harus terus mendampingi di LKPP
Bagaimana penilaiannya terhadap	Inspektorat memberikan kertas kerja risiko, membantu unit teknis

Pertanyaan	Jawaban
pelaksanaannya di LKPP?	memitigasi risiko di unitnya masing-masing dan bagaimana penanganannya dialihkan atau seperti ada, sudah ada sepemahaman saja. Fungsi Inspektorat mengendalikan risiko di masing-masing unit teknis, karena di tiap jabatan pasti mempunyai risiko tersendiri.
9. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
Pernahkah mendengar istilah tentang peningkatan kualitas pelayanan publik?	Ketika menjadi Tim RB tahun 2016
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan peningkatan kualitas pelayanan publik itu seperti apa?	Pelayanan publik memberikan kebutuhan para stakeholder terutama terkait pengadaan barang/jasa
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Adanya detail draf Peraturan Presiden tentang pengadaan barang/jasa
10. Strategi apa yang seharusnya dilakukan oleh pegawai LKPP untuk mendukung perbaikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan LKPP?	Kelebihan dalam pelaksanaan RB di LKPP sebetulnya dari aspek layanan dengan keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM sudah cukup bagus dalam memberikan pelayanan. Untuk kekurangannya sebenarnya terkait yang berhubungan dengan tata laksana dan

Pertanyaan	Jawaban
	peningkatan kapasitas SDM belum terlihat efektif, belum terlihat bahwa SDM adalah sebuah aset penting dalam suatu organisasi, penataan organisasi. Di LKPP itu ada yang kurang sepertinya di area akuntabilitas terkait dengan pertanggungjawaban. Rb baru sebatas mengumpulkan data untuk penilaian RB, harusnya nilai RB di tahun 2020 harusnya nilainya lebih bagus. Untuk menaikkan RB perbaikan dilakukan lebih ke penguatan pengawasan, organisasi, dan SDM.

POLITEKNIK
STIA LAN
 J A K A R T A

Transkrip Wawancara Penelitian Informan KI 2.2
Analisis Persepsi Pegawai Terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1. Informan

- a. Nama : Inamawati Mastuti Dewi
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. Pendidikan Terakhir : S-1
- d. Jabatan : Analis Kebijakan Muda dan Subkoordinator di Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
- e. Unit Kerja : Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
- f. Hari, tanggal : Selasa,
- g. Waktu : 6 April 2021

2. Wawancara

Pertanyaan	Jawaban
Assalamuálaikum, terima kasih sudah bersedia menjadi informan dalam Penelitian saya dalam rangka penyusunan tesis. Penelitian saya berjudul "Analisis Persepsi Pegawai terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di LKPP" yang akan membahas terkait delapan area perubahan dan pada	Waálaikumussalam Teh

Pertanyaan	Jawaban
wawancara ini terkait persepsi yang menyangkut bagaimana mendapatkan informasinya, pemahamannya, dan penilaiannya.	
1. Definisi Reformasi Birokrasi	
Pernahkah mendengar istilah Reformasi Birokrasi?Bolehkah menceritakan lebih detail?	Kebetulan saya adalah anggota Tim RB di tahun 2019, kalo gak salah dulu yang bagian ngurusin Tim RB yang mengumpulkan data dukung . Tahun 2020 menjadi Tim Road Map Reformasi Birokrasi (RB), tahunya drai situ. Tahu pertama kalinya dari awal masuk tahun 2014 ketika masuk jadi CPNS
Berdasarkan pemahaman, apa yang dimaksud dengan Reformasi Birokrasi?	Definisi lebih kea rah perbaikan terkait sistem terkait pemerintahan menjadi lebih baik lagi di system pemerintahan
2. Manajemen Perubahan	
Pernahkah mendengar istilah tentang manajemen perubahan?	Pernah dengar tahun 2019
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan manajemen perubahan itu seperti apa?	Istilahnya membuat suatu terobosan baru
Bagaimana penilaiannya terhadap	Membuat program di Deputi 4 supaya SDM tahu tentang kedeputian 4,

Pertanyaan	Jawaban
pelaksanaannya di LKPP?	salah satunya membuat quis terkait visi misi deputi
3. Deregulasi Kebijakan	
Pernahkah mendengar tentang deregulasi kebijakan?	Baru dengar dari The Hestri, tahunya istilahnya penataan perundang-undangan
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan deregulasi kebijakan itu seperti apa?	Membuat peraturan-peraturan turunan lebih kea rah menciptakan atauran baru yang dibutuhkan contoh aturan tentang penyelesaian sengketa
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Di LKPP mungkin namanya penataan perundang-undangan, contohnya ada peraturan turunan tentang penyelesaian sengketa, untuk memperjelas layanan kita, paying hukumnya apa, kalo tidak ada paying hukum membuat bingung stakeholder. Dengan adanya payung hukum dapat memperjelas layanan yang diberikan, jika dipandang terlalu banyak tinggal diharmonisasikan dengan peraturan lain
4. Penataan Organisasi	
Pernahkah mendengar istilah tentang penataan organisasi?	Baru denger ketika ada restrukturisasi organisasi tahun 2017, Deputi 4 yang berdampaknya perubahan nomenklatur, advokasi wilayah 1 , 2 sekarang jadi pemerintah pusat, pemerintah daerah disesuaikan dengan

Pertanyaan	Jawaban
	tuntutat kebutuhan stakeholder
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan manajemen perubahan itu seperti apa?	Adanya perubahan sesuai dengan tuntutan kebutuhan stakeholder, sehingga melayani dengan baik
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Contohnya tadi restrukturisasi organisasi
5. Penataan Tata Laksana	
Pernahkah mendengar istilah tentang penataan tata laksana?	Pernah dengar ketihan menjadi Tim RB tahun 2019, pada waktu masuk CPNS belum terlalu <i>aware</i>
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan penataan tata laksana itu seperti apa?	Berkaitan dengan SOP, lebih kepada standarisasi layanan suatu lembaga
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Di kedeputian 4 sudah banyak SOP-SOP yang ada seperti SOP memberikan pendampingan, probity advice, pengaduan, keterangan ahli. Yang tahu SOP hanya kedeputian 4, sedangkan SOP untuk unit kerja lain tidak diketahui seharusnya ada event diman mengenalkan SOP-SOP yang ada
6. Penataan Sumber Daya Manusia (SDM)	

Pertanyaan	Jawaban
Aparatur	
Pernahkah mendengar istilah tentang penataan SDM Aparatur?	Pernah denger pas masuk CPNS, tahu dari internet
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan SDM Aparatur itu seperti apa?	Penguatan SDM lebih kepada peningkatan kompetensi SDM di lingkungan K/L sendiri, kompetensinya berbeda
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	LKPP mempunyai sertifikasi PBJ, sertifikasi kompetensi, probity advance, pendamping kontrak, keterangan ahli sangat membantu pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Ada sebagian pegawai yang tidak bisa terlibat karena harus memiliki <i>soft skill</i> tertentu atau persyaratan khusus. Tetapi membuka seleksi yang terbuka yang boleh diikuti oleh siapa saja, yang lulus persyaratan boleh mengikuti pelatihan.
7. Penguatan Akuntabilitas	
Pernahkah mendengar istilah tentang penguatan akuntabilitas?	Pernah dengar ketika ditugaskan menjadi PPID Informasi Publik sekitar tahun 2016-2017
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan penguatan akuntabilitas itu seperti apa?	Terkait dengan keterbukaan suatu lembaga dapat diakses secara umum atau tidak

Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Terkait pengarsipan berkoordinasi dengan ANRI
8. Penguatan Pengawasan	
Pernahkah mendengar istilah tentang penguatan pengawasan?	Dengar sekitar tahun 2014-2015
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan penguatan pengawasan itu seperti apa?	Berkaitan dengan integritas, dimana setiap pegawai punya kebebasan untuk melaporkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Whistle Blowing System (WBS) Pengadaan, WBS Pegawai yang dari Inspektorat, sudah efektif karena sudah ada wadah yang menaunginya
9. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
Pernahkah mendengar istilah tentang peningkatan kualitas pelayanan publik?	Tahun 2014 sejak masuk CPNS
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan peningkatan kualitas pelayanan publik itu seperti apa?	Dituntun melakukan money untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi

Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Di Deputi 4 konsultansi bisa dilakukan aplikasi kedeputian, stakeholder dapat mengakses pengetahuan, youtube terkait pengadaan contoh tentang kompensasi, keadaan kahar. Lebih banyak ke aplikasi. Sedangkan untuk tatap muka dengan adanya PTSP
10. Strategi apa yang seharusnya dilakukan oleh pegawai LKPP untuk mendukung perbaikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan LKPP?	Kurang mandarah daging tentang Reformasi Birokrasi, kurang terdoktrin untuk memajukan Reformasi Birokrasi, hanya Tim RB yang aktif dalam Reformasi Birokrasi, sedangkan pegawai lain yang tidak terlibat terlihat cuek. Tidak terinfo ada 8 area perubahan. Nilai Reformasi Birokrasi tidak signifikan ibaratnya pekerjaan kita yang banyak tetapi ketika penilaian tidak terinfokan. Format dari PermenPAN-RB kaya yang baku jadi tidak banyak ruang untuk menuangkan hal-hal yang lebih banyak, melaporkan kinerja kita yang banyak tadi. Strategi lebih kearah koordinasi dengan tim penilai RB dari KemenPAN-RB, sehingga apa yang diinginkan MenPAN-RB selaras atau satu pemahaman dengan kita. Dari Biro Perencanaan LKPP lebih mendetailkan kedelapan area perubahan tadi, sehingga pegawai dapat mendukung lebih baik dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di LKPP.

Pertanyaan	Jawaban
	Dibuat video-video yang menarik diputar di website, sosialisasi segencarnya dalam area perubahan ini, sehingga semuanya <i>aware</i>, bagaimana car akita mendukung, dan tahu apa manfaat dari Reformasi Birokrasi, misalnya membuat forum diskusi untuk membicarakan suatu tema permasalahan, sehinga semua Tim tahu, LPSE misalnya pada masa pendemi ini, inovasinya bisa mediasi lewat <i>teleconference</i> atau <i>zoom</i>

POLITEKNIK
STIA LAN
 J A K A R T A

Transkrip Wawancara Penelitian Informan KI 2.3
Analisis Persepsi Pegawai Terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1. Informan

- a. Nama : Rizky Arimawati
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. Pendidikan Terakhir : S-2
- d. Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Pusdiklat PBJ
- e. Unit Kerja : Pusdiklat PBJ
- f. Hari, tanggal : Kamis, 8 April 2021
- g. Waktu : 13.30-14.30 WIB

2. Wawancara

Pertanyaan	Jawaban
Assalamuálaikum, terima kasih sudah bersedia menjadi informan dalam Penelitian saya dalam rangka penyusunan tesis. Penelitian saya berjudul "Analisis Persepsi Pegawai terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di LKPP" yang akan membahas terkait delapan area perubahan dan pada	Waálaikummsalam Wr Wb Mbak

Pertanyaan	Jawaban
wawancara ini terkait persepsi yang menyangkut bagaimana mendapatkan informasinya, pemahamannya, dan penilaiannya.	
1. Definisi Reformasi Birokrasi	
Pernahkah mendengar istilah Reformasi Birokrasi?Bolehkah menceritakan lebih detail?	Pernah tau tahun 2016 sesudah menjadi PNS, awal CPNS belum pernah mendengar Reformasi Birokrasi, tahu lewat pertemuan-pertemuan atau rapat pembahasan
Berdasarkan pemahaman, apa yang dimaksud dengan Reformasi Birokrasi?	Melakukan perubahan menjadi lebih baik dari sisi pengelolaan pemerintahan yang banyak mencakup berbagai hal mungkin dari sisi SDM, tata Kelola yang ujungnya memberikan pelayanan kepada masyarakat
2. Manajemen Perubahan	
Pernahkah mendengar istilah tentang manajemen perubahan?	Tahun 2016 lewat rapat pembahasan dan sosialisasi dari BPOT sebagai peserta
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan manajemen perubahan itu seperti apa?	Adanya perubahan yang lebih baik suatu kegiatan yang ,mendukung kegiatan Reformasi Birokrasi, ada suatu pengelolaan dari Reformasi Birokrasi yang nantinya jadi terobosan-terobosan dari instansi tersebut

Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Adanya agen perubahan, konsultasi pelayanan terpadu PTSP karena banyak layanan banyak yang datang ke kantor sehingga ada PTSP, kalo di Pusdiklat karena pandemic program pelatihan yang tadinya klasikal menjadi <i>blended learning</i> atau <i>distance learning</i>
3. Deregulasi Kebijakan	
Pernahkah mendengar tentang deregulasi kebijakan?	Tahun 2016 lewat rapat pembahasan dan sosialisasi dari BPOT sebagai peserta
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan deregulasi kebijakan itu seperti apa?	Penyederhanaan dari peraturan-paraturan , kadang-kadang selama ini peraturan yang telah disusun tumpang tindih sehingga dperlu dilakukan reviu sehingga tidak terlalu banyak tetapi cukup efektif dalam pelaksanaannya
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Kebijakan terkait dengan pohon regulasi memetakan regulasi mana saja yang tumpang tindih, manakan yang harus dihapuskan atau mana yang harus disatukan,sudah efektif dilakukan oleh LKPP walaupun masih dalam proses pada tahun 2020 ikut dalam rapatnya
4. Penataan Organisasi	
Pernahkah mendengar istilah tentang penataan	Tahun 2016 lewat rapat pembahasan dan sosialisasi dari BPOT sebagai

Pertanyaan	Jawaban
organisasi?	peserta
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan manajemen perubahan itu seperti apa?	Lebih ke reorganisasi perubahan organisasi ke yang lebih sederhana, tidak terlalu banyak cabang sehingga tidak terlalu lama pelaksanaan birokrasinya, lebih organisasi yang lebih sederhana tapi efektif
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Perubahan nomenklatur dulu Direktorat Pelatihan Kompetensi berubah menjadi Pusdiklat PBJ, kemudian adanya penyetaraan jabatan fungsional sehingga keluar juga Perlem Nomor 1 tahun 2021 tentang SOTK yang baru. Jabatan Fungsional masih bertindak sebagai koordinator dan subkoordinator, jadinya sepertinya hanya berganti nama, dari sisi organisasi perlu benar-benar memetakan jabatan fungsional apa saja yang diperlukan, contoh di Pusdiklat tidak hanya memerlukan jabatan fungsional widyaiswara saja, tetapi memerlukan jabatan fungsional lain sehingga pelaksanaan kegiatan di Pusdiklat masih tetap dapat berlangsung.
5. Penataan Tata Laksana	
Pernahkah mendengar istilah tentang penataan tata laksana?	Tahun 2016 lewat rapat pembahasan dan sosialisasi dari BPOT sebagai peserta

Pertanyaan	Jawaban
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan penataan tata laksana itu seperti apa?	Pengelolaan yang lebih baik dari segi tata kelolanya
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Proses bisnis LKPP yang saya tahu tahun 2020 LKPP melakukan workshop proses bisnis LKPP itu seperti apa
6. Penataan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	
Pernahkah mendengar istilah tentang penataan SDM Aparatur?	Tahun 2016 lewat rapat pembahasan dan sosialisasi dari BPOT sebagai peserta
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan SDM Aparatur itu seperti apa?	Penguatan kapasitas SDM mungkin dengan peningkatan kompetensinya, reward, atau tugas belajar, ada pemetaan kompetensi sesuai kualifikasi jabatannya
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Karena dulu pernah mampir di kepegawaian selama 2 bulan, di kepegawaian mulai Menyusun regulasi tentang system merit tapi sepertinya belum jadi, kemudian sudah dilakukan asesmen kompetensi cocoknya dimana, minat pegawai/mapping talent, kegiatannya menuju efektif, yang perlu ditingkatkan kerja sama diklat yang perlu ditingkatkan,

Pertanyaan	Jawaban
	kalo dari sisi pegawai sudah cukup efektif, kerja sama diklat perlu ditingkatkan mungkin karena keterbatasan anggaran. Terkait kewajiban setahun ASN minimal 20 JP, dari kepegawaian sudah meminta data-data pelatihan yang dibutuhkan apa saja, dana ada pendataan siapa aja sudah diklat apa saja dan berapa JP, apaun itu termasuk youtube konten atau melalui <i>elearning</i>
7. Penguatan Akuntabilitas	
Pernahkah mendengar istilah tentang penguatan akuntabilitas?	Tahun 2016 lewat rapat pembahasan dan sosialisasi dari BPOT sebagai peserta
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan penguatan akuntabilitas itu seperti apa?	Hubungannya dengan pertanggungjawaban, kita sebagai instansi pemerintah harus akuntabel sehingga dapat dipertanggungjawabkan di masyarakat, bagaimana kita memberikan transparansi ke masyarakat karena menggunakan dana pemerintah
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	LKPP tiap tahun sudah Menyusun LKJ itu sudah merupakan bentuk akuntabilitas LKPP karena bisa dilihat oleh masyarakat, dari segi SDM juga sudah ada SKP

Pertanyaan	Jawaban
8. Penguatan Pengawasan	
Pernahkah mendengar istilah tentang penguatan pengawasan?	Tahun 2016 lewat rapat pembahasan dan sosialisasi dari BPOT sebagai peserta
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan penguatan pengawasan itu seperti apa?	Audit internal biasanya dari Inspektorat sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan regulasi atau peraturan tidak ada penyimpangan
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Tahun 2020 dari Inspektorat sudah menunjuk zona integritas ini sebagai komitmen kita dalam segi pengawasan, melakukan pengawasan internal SPIP dari Inspektorat melakukan ke semua unit kerja di LKPP, penanganan gratifikasi, system pengaduan dikelola tidak dibiarkan, tetapi ditindaklanjuti. Belum cukup efektif tahu tentang pengawasan yang sudah dilakukan, sehingga diperlukan internalisasi, sosialisasi terkait pengawasan, mungkin kalo tidak ditugaskan tidak akan tahu
9. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
Pernahkah mendengar istilah tentang peningkatan kualitas pelayanan publik?	Tahun 2016 lewat rapat pembahasan dan sosialisasi dari BPOT sebagai peserta
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud	Memberikan terobosan-terobosan, dinamis dalam memberikan

Pertanyaan	Jawaban
dengan peningkatan kualitas pelayanan publik itu seperti apa?	pelayanan publik karena kondisi yang cepat berubah seperti sekarang karena pandemik covid-19 misal dengan penyusunan SOP
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Atas nama Pusdiklat selalu berusaha minimal mempertahankan dan selalu melakukan peningkatan perubahan-perubahan, sudah melakukan ISO untuk menjaga kualitas, menyesuaikan SOP, Pusdiklat juga melakukan lomba-lomba dalam hal inovasi. Di LKPP sudah ada SKM untuk mengetahui juga pelayanan yang sudah diberikan LKPP, sebagai bahan perbaikan selanjutnya. Mulai diperbaiki dari segi metode, pengambilan sampel, dari MenPAN RB juga ada standar terkait kuesioner.
10. Strategi apa yang seharusnya dilakukan oleh pegawai LKPP untuk mendukung perbaikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan LKPP?	Kelebihan Reformasi Birokrasi selalu berusaha menuju kearah lebih baik, mencoba menata Kembali dalam 8 area perubahan, ada komitmen dari pimpinan untuk memperbaiki RB, kekurangannya kurangnya sosialisasi terkait Reformasi Birokrasi ke semua staf pegawai. Kurang aware tentang Reformasi Birokrasi harus adanya sosialisasi , kurang adanya konsisten beberapa kegiatan. Harusnya ada evaluasi dan kekonsistenan dalam melaksanakan kegiatan. Sehingga strategi yang dapat dilakukan sebagai individu harus memiliki rasa memilki LKPP sehingga kita dapat

Pertanyaan	Jawaban
	memberikan kualitas terbaik dari diri kita dalam bekerja jangan asal selesai intinya bekerja dengan hati, dari sisi LKPP diperlukan langkah-langkah yang nyata di kedelapan area perubahan kemudian dilakukan evaluasi dari langkah-langkah cukup efektif atau tidak, sehingga akan jelas apa yang akan kita capai dari tahun ke tahun, tentunya kita juga dapat Menyusun perencanaan yang lebih baik dari hasil evaluasi tersebut. Langkah-langkah nyata tersebut diantaranya dilakukan internalisasi dan sosialisasi, setiap area perubahan ada rencana aksi yang akan dilakukan, jika dari rencana aksi tersebut ada kendala, berarti harus segera ditindaklanjuti.

Transkrip Wawancara Penelitian Informan KI 2.4
Analisis Persepsi Pegawai Terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1. Informan

- a. Nama : Ermawanto
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Pendidikan Terakhir : S2
- d. Jabatan : Perencana Muda dan Subkoordinator Biro Perencanaan dan Keuangan
- e. Unit Kerja : Biro Program dan Keuangan (BPK)
- f. Hari, tanggal : Senin, 12 April 2021
- g. Waktu : 11.00-12.00 WIB

2. Wawancara

Pertanyaan	Jawaban
Assalamuálaikum, terima kasih sudah bersedia menjadi informan dalam Penelitian saya dalam rangka penyusunan tesis. Penelitian saya berjudul “Analisis Persepsi Pegawai terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di LKPP” yang akan membahas terkait delapan area perubahan	Wáalakumussalam

Pertanyaan	Jawaban
dan pada wawancara ini terkait persepsi yang menyangkut bagaimana mendapatkan informasinya, pemahamannya, dan penilaiannya.	
1. Definisi Reformasi Birokrasi	
Pernahkah mendengar istilah Reformasi Birokrasi?Bolehkah menceritakan lebih detail?	Pernah dengar tahun 2001 dan masuk CPNS tahun 2014, melalui media TV
Berdasarkan pemahaman, apa yang dimaksud dengan Reformasi Birokrasi?	Kalo secara sederhana Reformasi Birokrasi berarti perubahan-perubahan yang dilakukan, masih mengetahui kulit luarnya saja
2. Manajemen Perubahan	
Pernahkah mendengar istilah tentang manajemen perubahan?	Mengetahui ketika masuk ASN sekitar tahun 2014 karena kebetulan ditempatkan di Biro Perencanaan dan Tata Laksana (BPOT) LKPP
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan manajemen perubahan itu seperti apa?	Perubahan-perubahan terkait dengan pengaturan manajemen yang dilakukan suatu instansi
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	LKPP telah melakukan melakukan reorganisasi kalua dulu tidak mempunyai inspektorat sekarang sudah ada, kalua dulu tidak ada Pusdiklat sekarang sudah ada. Artinya sudah ada langka-langkah kegiatan

Pertanyaan	Jawaban
	yang terkonsentrasi sesuai tugasnya. Saya tidak punya ukuran sudah efektif atau belum, tapi yang paling yang sederhana sudah mulai dilakukan perbaikan, sebagai contoh dengan adanya Pusdiklat diharapkan pelatihan-pelatihan dipusatkan di Pusdiklat
3. Deregulasi Kebijakan	
Pernahkah mendengar tentang deregulasi kebijakan?	Mengetahui ketika masuk ASN sekitar tahun 2014 karena kebetulan ditempatkan di Biro Perencanaan dan Tata Laksana (BPOT) LKPP
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan deregulasi kebijakan itu seperti apa?	Deregulasi kebijakan mungkin pengurangan kebijakan, jangan-jangan ASN tidak dinilai tidak perform karena terlalu banyak aturan, yang sebetulnya tidak semua kebijakan tidak semuanya harus diikat sebagai regulasi
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Misalnya dulu dalam kode etik seluruh pegawai dimasukkan termasuk jasa lainnya, dalam perubahan regulasi terbaru jasa lainnya bukan merupakan lagi pegawai, tetapi memang sesuatu yang berhubungan dengan pengadaan, harapannya jasa lainnya mempunyai kinerja yang lebih meningkat.
4. Penataan Organisasi	

Pertanyaan	Jawaban
Pernahkah mendengar istilah tentang penataan organisasi?	Mengetahui ketika masuk ASN sekitar tahun 2014 karena kebetulan ditempatkan di Biro Perencanaan dan Tata Laksana (BPOT) LKPP
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan manajemen perubahan itu seperti apa?	Penataan organisasi merupakan pembenahan dalam hal kestruktur organisasi
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Penataan organisasi sebenarnya sedang diajukan setiap Eselon I diupayakan mempunyai kesekretariatan, karena sejauh ini yang mempunyai Pusdiklat, Inspektorat, seharusnya Eselon I juga punya. Jangan hanya pada pemenuhan dokumentasi tetapi harus dilihat juga lebih ke arah kualitas.
5. Penataan Tata Laksana	
Pernahkah mendengar istilah tentang penataan tata laksana?	Mengetahui ketika masuk ASN sekitar tahun 2014 karena kebetulan ditempatkan di Biro Perencanaan dan Tata Laksana (BPOT) LKPP
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan penataan tata laksana itu seperti apa?	Memastikan proses bisnis sudah tertata dengan baik, dan dapat terinformasikan kepada calon user dan pemberi layanan secara sederhana dituangkan dalam SOP seharusnya tergambarkan kepada hak

Pertanyaan	Jawaban
	dan kewajiban dari setiap pihak
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Sudah efektif karena semua proses bisnis sudah ada SOP-nya, tetapi untuk implementasinya sulit untuk diukur apakah sudah diefektif atau belum, apakah SOP itu harus dilihat satu-satu ataukah dijadikan sebagai proses bisnis pokoknya. Tidak terlalu tau karena bukan domain dari unit kerja saya
6. Penataan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	
Pernahkah mendengar istilah tentang penataan SDM Aparatur?	Mengetahui ketika masuk ASN sekitar tahun 2014 karena kebetulan ditempatkan di Biro Perencanaan dan Tata Laksana (BPOT) LKPP
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan SDM Aparatur itu seperti apa?	Bagaimana organisasi mampu meningkatkan kompetensi pegawai
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Saya pribadi melihat yang mengajukan Tugas Belajar atau beasiswa tidak pernah ada ditolak, hanya terkendala dari anggaran, namun lagi-lagi kemampuan membiayainya yang tidak besar karena anggaran LKPP tidak besar. Yang terkait 20 JP atauran dari ASN sebetulnya tidak harus semua diklat, tapi coaching dari atasan langsung juga merupakan salah satu

Pertanyaan	Jawaban
	idjanya punya nilai yang cukup signifikan dalam pemenuhan 20 JP, cuma saya tidak tau aturan teknisnya seperti apa. Tahun 2019 di LKPP juga pernah ada kenduri ilmu, merupakan ajang untum saling sharing dari pegawai yang telah mengikuti pelatihan. Saya yakin yang 20 JP tidak harus dengan diklat, tapi bisa dengan coaching atau kenduri ilmu
7. Penguatan Akuntabilitas	
Pernahkah mendengar istilah tentang penguatan akuntabilitas?	Mengetahui ketika masuk ASN sekitar tahun 2014 karena kebetulan ditempatkan di Biro Perencanaan dan Tata Laksana (BPOT) LKPP
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan penguatan akuntabilitas itu seperti apa?	Sebetulnya sesuatu yang bisa dicek atau di <i>tracking</i>
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Kita sebetulnya pelaksanaannya sudah baik, hanya kadang pencatatan dokumentasinya yang kurang. Kalo dari sisi pribadi saya dibagian anggaran bisa dijelaskan seperti apa. Kalo dari sisi anggran sudah cukup baik. Biasanya yang malekukan editing POK tidak sampai structural, sebagian hanya staf pelaksana, harusnya pengawasan pelaksanaannya dijalankan oleh strukturalnya, secara dokumen sudah cukup baik.

Pertanyaan	Jawaban
8. Penguatan Pengawasan	
Pernahkah mendengar istilah tentang penguatan pengawasan?	Mengetahui ketika masuk ASN sekitar tahun 2014 karena kebetulan ditempatkan di Biro Perencanaan dan Tata Laksana (BPOT) LKPP
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan penguatan pengawasan itu seperti apa?	Bagaimana Lembaga melakukan pengawasan pekerjaan dalam suatu instansi untuk meningkatkan pengawasan pelaksanaan di Instansi
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Dengan adanya Inspektorat seharusnya menjadi lebih baik, tetapi lagi-lagi prosesnya kan banyak, harusnya bisa memastikan point-point pengawasan bisa dikoordinasikan dengan semua pihak. Bagaimana LKPP mempunyai kemampuan untuk melakukan pengawasan internal secara masif.
9. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
Pernahkah mendengar istilah tentang peningkatan kualitas pelayanan publik?	Mengetahui ketika masuk ASN sekitar tahun 2014 karena kebetulan ditempatkan di Biro Perencanaan dan Tata Laksana (BPOT) LKPP
Berdasarkan pemahaman yang	Definisinya adalah sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh LKPP

Pertanyaan	Jawaban
dimaksud dengan peningkatan kualitas pelayanan publik itu seperti apa?	
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	LKPP secara lembaga pelayanan di masing-masing unit organisasi, misalnya di Sestama memberikan pelayanan public lebih ke internal ke unit kerja pelaksana, memastikan kalo anggaran dibutuhkan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan. Saya tidak punya ukuran sudah efektif atau belum, tapi semenjak saya masuk LKPP semua pegawai LKPP harus paham terkait Pengadaan karena dari Instansi luar, siapa pun yang dari LKPP pasti tahu tentang pengadaan. Saya tidak tau inovasi pelayanan publik apakah harus merupakan output tersendiri, bisa jadi adaptasi memberikan pelayanan juga merupakan inovasi
10. Strategi apa yang seharusnya dilakukan oleh pegawai LKPP untuk mendukung perbaikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan LKPP?	Terdapat ketidaksinkronan dalam pengertian-pengertian atau definisi terkait Reformasi Birokrasi. Dari segi individu LKPP bersifat <i>egaliter</i> , artinya staf saja boleh mnghadap ke eselon I atau bebas mengeluarkan pendapat dan budaya itu tidak mudah mungkin di instansi lain. Kadang penegakan aturan yang membuat kita kaku, aturan memang harus ada, tetapi harus <i>soft</i> dalam menyampaikannya kepada setiap pegawai. Dari sisi pribadi kita harus dapat memberi saran dan masukan untuk perbaikan

Pertanyaan	Jawaban
	LKPP, artinya semua ide bisa disampaikan karena ide itu bisa datang dari mana saja. Harapannya dengan adanya kesekretariatan di masing-masing Eselon I itu dapat memastikan kelengkapan dokumen itu ada. Bagaimana masing-masing unit kerja teknis dapat mendokumentasikan hasil pekerjaannya.

Transkrip Wawancara Penelitian Informan KI 2.5
Analisis Persepsi Pegawai Terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1. Informan

- a. Nama : Febri Sidabolak
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. Pendidikan Terakhir : S-2
- d. Jabatan : Perencana Muda dan Subkoordinator di Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
- e. Unit Kerja : Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
- f. Hari, tanggal : Rabu, 7 April 2021
- g. Waktu : 10.00-11.00

2. Wawancara

Pertanyaan	Jawaban
Selamat siang Febri, terima kasih sudah bersedia menjadi informan dalam Penelitian saya dalam rangka penyusunan tesis. Penelitian saya berjudul "Analisis Persepsi Pegawai terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di LKPP" yang akan membahas terkait delapan area perubahan dan pada	Siang teh

Pertanyaan	Jawaban
wawancara ini terkait persepsi yang menyangkut bagaimana mendapatkan informasinya, pemahamannya, dan penilaiannya.	
1. Definisi Reformasi Birokrasi	
Pernahkah mendengar istilah Reformasi Birokrasi? Bolehkah menceritakan lebih detail?	Pernah dengar ketika masuk LKPP tahun 2014 pas masuk CPNS lewat televisi
Berdasarkan pemahaman, apa yang dimaksud dengan Reformasi Birokrasi?	Perubahan dari birokrasi yang sudah ada menuju ke birokrasi yang terbaru
2. Manajemen Perubahan	
Pernahkah mendengar istilah tentang manajemen perubahan?	Pernah waktu tahun 2019, baru, soalnya tidak pernah menjadi PIC Reformasi Birokrasi, ketika masuk CPNS juga belum tahu, tahu dari PIC Reformasi Birokrasi di katalog ada 8 area perubahan
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan manajemen perubahan itu seperti apa?	Garis besarnya merubahan atau cara-cara atau aspek-aspek apa aja yang akan diubah siapa-siapa saja pelakunya
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Implementasi di LKPP deesslonisasi menghilangkan sebagian besar eselon 3 dan eselon 4

Pertanyaan	Jawaban
3. Deregulasi Kebijakan	
Pernahkah mendengar tentang deregulasi kebijakan?	Pernah dengar tidak dalam topik reformasi birokrasi tahun 2017
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan deregulasi kebijakan itu seperti apa?	Penyederhanaan kebijakan
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Katalog kebijakannya termasuk deregulasi kebijakan, karena termasuk lebih sederhana, sebagai contoh kendaraan motor jadi lebih gampang gak perlu tender, tinggal beli di katalog tidak harus dengan proses panjang, lebih transparan. Bumerang ke kita katalog selalu ditunggu, bebannya di LKPP untuk proses katalog.
4. Penataan Organisasi	
Pernahkah mendengar istilah tentang penataan organisasi?	Pernah dengar gara-gara bahan Reformasi Birokrasi tahun 2021, yang mengurus hanya PIC Reformasi Birokrasi
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan manajemen perubahan itu seperti apa?	Lebih ke internal organisasi tersebut dilihat dari kesesuaian formasi dan kesesuaian ABK
Bagaimana penilaiannya terhadap	Di LKPP telah dilakukan reorganisasi di Sestama dilakukan lebih untuk

Pertanyaan	Jawaban
pelaksanaannya di LKPP?	mendekatkan ke fungsinya. Kalo bisa saran, yang di D.2 misalnya kaya system pengang sendiri-sendiri padahal sama-sama SPSE, sebaiknya satu system saja karena sifat pekerjaanya sama, katalog masih sendiri SPSE lebig ke e-tendering
5. Penataan Tata Laksana	
Pernahkah mendengar istilah tentang penataan tata laksana?	Pernah dengan sekarang tahun 2021 pas rapat direktorat, karena waktu CPNS tidak ada pengenalan tentang Reformasi Birokrasi, jika bukan Tim RB agak kurang familiar tentang Reformasi Birokrasi
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan penataan tata laksana itu seperti apa?	Penyusunan SOP , terkaitan dengan indtruksi kerja
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Di katalog masih dalam penyusunan rancangan SOP, tapi belum disahkan, dari tahun 2016 sudah ada, tapi diubah-ubah disesuaikan lagi tahun 2019 tapi samapai sekarang belum disahkan. Ketika regulasi berubah, pasti berdampak ke SOP
6. Penataan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	
Pernahkah mendengar istilah tentang penataan	Tahun 2021

Pertanyaan	Jawaban
SDM Aparatur?	
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan SDM Aparatur itu seperti apa?	Peningkatan kompetensi atau penempatan sesuai formasi
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Harus ada yang lebih spesifik, tapi da beberapa posisi bisa diisi dari berbagai macam akademis
7. Penguatan Akuntabilitas	
Pernahkah mendengar istilah tentang penguatan akuntabilitas?	Dengarnya tahun 2021, tahu dari rapat koordinasi internal katalog
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan penguatan akuntabilitas itu seperti apa?	Transparansi dalam hal melaksanakan menjalankan proses pekerjaannya termasuk ada monitoringnya
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Di LKPP sudah ada e-office, SiRUP jadi rencana-rencana pengadaan sudah diumumkan jadi calon penyedia akan melihat potensinya, sudah dilaksanakan cukup bagus, bisa diakses oleh banyak orang
8. Penguatan Pengawasan	
Pernahkah mendengar istilah tentang	Tahu dari rapat koordinasi internal katalog tahun 2021

Pertanyaan	Jawaban
penguatan pengawasan?	
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan penguatan pengawasan itu seperti apa?	Identik dengan Inspektorat
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Misalnya di katalog banyak berhubungan dengan penyedia atau pelaku usaha, jadi posisinya lebih rawan, sekarang sudah ada PIC untuk gratifikasi sudah ada Satgas gratifikasi. Di katalog ada rating di e-purchasing PPK bisa memberikan bintang-bintang/rating untuk penyedia yang ada di katalog, baru 2 tahun ke belakang, belum pernah dievaluasi keefektifannya
9. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
Pernahkah mendengar istilah tentang peningkatan kualitas pelayanan publik?	Pernah dengar sebelum rapat koordinasi, tahun 2020 pernah diundang dari BPOT tentang pelayanan publik
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan peningkatan kualitas pelayanan publik itu seperti apa?	Core bisnis PNS sebagai pelayan public, apa-apa yang kita sediakan untuk public, bisa jadi penyediaan informasi, system, regulasi
Bagaimana penilaiannya terhadap	Di LKPP di katalog sudah ada nama sendiri customer katalog elektronik

Pertanyaan	Jawaban
pelaksanaannya di LKPP?	berupa nomor whats up, email khusus, tiap hari ada petugas yang bertugas menjawab pertanyaan yang masuk, pendampingan ke stakeholder-stakeholder. Misal untuk pemilihan alkes, di tahapan pemilihan itu ada tahap sosialisasi ke calon penyedia, ada pelayan public misal ada yang ingin melakukan perubahan data, pelayanan dari hulu ke hilir
10. Strategi apa yang seharusnya dilakukan oleh pegawai LKPP untuk mendukung perbaikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan LKPP?	Kekurangan secara umum tidak terpublikasi dengan baik, sehingga tidak terlalu tahu tentang Reformasi Birokrasi tahunya hanya untuk naikin tunjangan kinerja, kurangnya sosialisasi di LKPP, atau sayanya terlalu sibuk ke hal teknis. Kenaikan nilai RB yang tidak signifikan ya mungkin solusi yang disediakan bukan untuk mengatasi permasalahan yang sebenarnya, mungkin yang diharapkan MenPAN RB dengan apa yang kita jawab tidak pas menurut PermenPAN-RB. Strategi yang mungkin sebaiknya dilakukan, yang mungkin yang perlu di LKPP lakukan melakukan evaluasi apa yang RB di tahun 2019 dibandingkan dengan apa yang diminta Permen PAN-RB, banyak diskusi dengan PermenPAN-RB supaya lebih memahami konsep dan

Pertanyaan	Jawaban
	pengertiannya, konsultasi untuk next tahun ke depannya, menyebarluaskan informasi RB ke pegawai-pegawainya, perlu juga kampanye atau sosialisasi, per sering-sering di sounding bisa jadi pada tidak mengerti, supaya jadi triger bagi pegawai, supaya timbul awareness apa yang akan dilakukan. Di BPOT menyediakan pelatihan yang menjadi pelayan publik seperti interpersonal publik. Sebagai individu mendukung goal-nya insatansi.

POLITEKNIK
STIA LAN
 J A K A R T A

Transkrip Wawancara Penelitian Informan KI 2.6
Analisis Persepsi Pegawai Terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1. Informan

- a. Nama : Hilman Fazri
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Pendidikan Terakhir : S-1
- d. Jabatan : Analis Kebijakan Muda dan Subkoordinator di Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
- e. Unit Kerja : Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
- f. Hari, tanggal : Senin, 12 April 2021
- g. Waktu : 15.30-16.30

2. Wawancara

Pertanyaan	Jawaban
Assalamuálaikum, terima kasih sudah bersedia menjadi informan dalam Penelitian saya dalam rangka penyusunan tesis. Penelitian saya berjudul "Analisis Persepsi Pegawai terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di LKPP" yang akan membahas terkait delapan area perubahan dan pada	Waálaikumussalam

Pertanyaan	Jawaban
wawancara ini terkait persepsi yang menyangkut bagaimana mendapatkan informasinya, pemahamannya, dan penilaiannya.	
1. Definisi Reformasi Birokrasi	
Pernahkah mendengar istilah Reformasi Birokrasi?Bolehkah menceritakan lebih detail?	Dengar ketika Pak Jokowi jadi presiden, berarti 6 tahun yang lalu sekitar tahun 2015, digadag-gadag ada Reformasi Birokrasi karena dulu kerja di swasta gak terlalu memperhatikan melalui tv ketika kampanye Jokowi
Berdasarkan pemahaman, apa yang dimaksud dengan Reformasi Birokrasi?	Mempercepat birokrasi, terkenal birokrasi pemerintah itu lambat lam itu dulu
2. Manajemen Perubahan	
Pernahkah mendengar istilah tentang manajemen perubahan?	Tahun 2020 baru tahu karena waktu itu jadi Tim Asesor Reformasi Birokrasi LKPP, kalo yang manajemen perubahan waktu CPNS sudah tahu, tapi kao detail di bawahnya baru dengar tahun 2020
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan manajemen perubahan itu seperti apa?	Jaman selalu berubah baik SDM maupun situasidan itu menjadi tantangan sehingga perlu dilakukan perlu tools sehingga kita inline dengan tujuan organisasi, perubahan itu pasti
Bagaimana penilaiannya terhadap	Impelementasinya tadi agen perubahan, jangan kaku mengikuti

Pertanyaan	Jawaban
pelaksanaannya di LKPP?	perubahan yang terjadi, penerapannya mungkin regulasi, terasa banget di katalog terutama eksternal banyak pemeriksaan dari APH, butuh alat berupa SOP yang diperbaharui yang sesuai dengan kondisi lapangan, dulu SOP tidak terlalu detail karena mungkin menganggapnya tidak terlalu rijit seperti sekarang, pendapat itu sering terkalahkan kalo pakenya pendapat kalo baselinenya regulasi biasanya mereka lebih mau menerima
3. Deregulasi Kebijakan	
Pernahkah mendengar tentang deregulasi kebijakan?	Tahun 2020 baru tahu karena waktu itu jadi Tim Asesor Reformasi Birokrasi LKPP
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan deregulasi kebijakan itu seperti apa?	Mengurangi peraturan-peraturan yang ada dibuat lebih sederhana lebih sedikit, bikin 1 tapi dapat mencakup semuanya
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Menggabungkan peraturan katalog dengan toko daring, tahun 2021 akan digabungkan jadi bisa mencakup semuanya, dulu Perlem 11 Tahun 2018, sekarang 3 ketentuan digabungkan jadi satu katalog elektronik, e-purchasing, dan toko daring

Pertanyaan	Jawaban
4. Penataan Organisasi	
Pernahkah mendengar istilah tentang penataan organisasi?	Tahun 2020 baru tahu karena waktu itu jadi Tim Asesor Reformasi Birokrasi LKPP
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan manajemen perubahan itu seperti apa?	Berkaitan dengan tahapan atau proses
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Kemaren tahun 2019 akhir diubah organisasinya, dulu semuanya oprasionalnya, sekarang diubah jadi ada subdit operasional ada subdit yang membuat kebijakan. Katalog bukan produksi tapi ada yang membuat kebijakannya. Menurut saya lebih efektif secara struktur organisasi, tapia da yang dilupakan jumlah orang atau SDM tetap sehingga kemampuan berproduksinya jadi berkurang
5. Penataan Tata Laksana	
Pernahkah mendengar istilah tentang penataan tata laksana?	Tahun 2020 baru tahu karena waktu itu jadi Tim Asesor Reformasi Birokrasi LKPP
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan penataan tata laksana itu seperti apa?	Berhubungan dengan SOP

Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Berubahnya organisasi berubah juga SOP-nya, ada sekitar 40 SOP. Banyaknya SOP tetapi yang dilaksanakan yang pokok-pokoknya saja, kalo saya pribadi dulu terlalu banyak SOP-nya. Yang digunakan SOP Pra Katalog dan SOP Paska Katalog, saya di Monev gak tau terlalu updatenya karena itu dibagian kebijakan
6. Penataan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	
Pernahkah mendengar istilah tentang penataan SDM Aparatur?	Tahun 2020 baru tahu karena waktu itu jadi Tim Asesor Reformasi Birokrasi LKPP
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan SDM Aparatur itu seperti apa?	Peningkatan kompetensi
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	SDM ada temuan BPK, Pokja Katalog kemampuan pengadaanya kurang, minta ke diraktur minta pelatihan ke Pusdiklat PBJ, tahun 2019 banyak juga pelatihan-pelatihan ke luar negeri, Pokja Katalog alat baik administrasi maupun substansi kalo dari temuan BPK. Penguatan SDM di LKPP secara keseluruhan sepertinya biasa aja kalo secara global tidak ada gebrakan-gebrakan khusus. Terkait 20 JP bagi ASN menurut saya

Pertanyaan	Jawaban
	kurang, tapi baru tahu juga dari The Hestri, seingat saya tahun 2020 tidak sampai 20 JP, kalo dari kegewaian tidak merasakan 20 JP dari kepegawaian. Dapat tapi dari unit kerja teknis
7. Penguatan Akuntabilitas	
Pernahkah mendengar istilah tentang penguatan akuntabilitas?	Tahun 2020 baru tahu karena waktu itu jadi Tim Asesor Reformasi Birokrasi LKPP
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan penguatan akuntabilitas itu seperti apa?	Berhubungan dengan pertanggungjawaban untuk atas apa yang dilaksanakan
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Dengan digunakannya aplikasi katalog full di tahun 2020 awal, kalo dulu manual, dokumen manual lebih rawan kalo mau diganti-ganti, kalo lewat aplikasi bisa tapi jadinya addendum tapi tercatat, karena isu itu sangat kental di katalog, ada negatifnya yaitu penyedia katalog tidak semua langsung paham dengan aplikasi katalog. Kalo untk pokja katalog untuk memilih penyedia, dulu manual terus dipindahkan ke aplikasi katalog, kemudian kita menginput ke aplikasi, kalo sekarang dari awal penyedia isi di aplikasi.

Pertanyaan	Jawaban
8. Penguatan Pengawasan	
Pernahkah mendengar istilah tentang penguatan pengawasan?	Tahun 2020 baru tahu karena waktu itu jadi Tim Asesor Reformasi Birokrasi LKPP
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan penguatan pengawasan itu seperti apa?	Pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencegah adanya kesalahan
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Kalo aplikasi kemajuannya BPK/auditor dapat melihat apa yang terjadi pokja atau penyedia, di tahun 2018, ada fungsi reviu dulu sebelum ditandatangani oleh Pak Kepala. Ada juga kajian untuk mengakaji apakah barang tersebut layak atau tidak layak masuk katalog, kalo reviu mengecek apay ng dilakukan Pokja Katalog. Kalo di LKPP yang lebih luas mungkin penerapan SPIP, kalo mau konsinyering harus ada pemberitahuan ke Inspektorat
9. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
Pernahkah mendengar istilah tentang peningkatan kualitas pelayanan publik?	Tahun 2020 baru tahu karena waktu itu jadi Tim Asesor Reformasi Birokrasi LKPP

Pertanyaan	Jawaban
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan peningkatan kualitas pelayanan publik itu seperti apa?	Pemberian layanan kepada masyarakat/penyedia atau K/L/PD lain
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Pelayanan publik tidak langsung ke masyarakat tapi sebagian besar ke kementerian lain, masyarakat dalam hal ini lebih banyak ke penyedia, secara global di LKPP sudah melakukan peningkatan pelayanan publik diantaranya ada aplikasi
10. Strategi apa yang seharusnya dilakukan oleh pegawai LKPP untuk mendukung perbaikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan LKPP?	Kelebihannya maidednya ke aplikasi, kurangnya kao non aplikasi masih kurang seperti SDM atau pendekatan prosedurnya. Kalo nilai RB tidak signifikan, LKPP kurang mendokumentasikan issue-isue yang harus diperbaiki untuk Reformasi Birokrasi. Aplikasi harus dimaintenance dengan sungguh-sungguh. Pendokumentasiannya yang kurang. Strategi untuk meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi untuk ke nilai RB maupun ke tujuan, karena kalo dulu saya di Tim RB tujuan sudah terlaksana, tapi dokumentasi menuju tujuannya pun tetap harus dipenuhi, jadi bisa di klaim juga oleh MenPAN RB pada waktu penilaian Reformasi Birokrasi. Kalo dari diri pribadi tetntunya dari setiap seksi ketemu masalah, pasti butuh perubahan, tapi kebijakannya atau penanganan

Pertanyaan	Jawaban
	permasalahannya hanya sekedar diskusi tapi tidak diterapkan dalam suatu dokumentasi atau tidak ditetapkan. Jika tidak terdokumentasi inovasi-inovasi yang ada tidak terlihat.

Transkrip Wawancara Penelitian Informan KI 2.7
Analisis Persepsi Pegawai Terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1. Informan

- a. Nama : Muhamad Irsan Nasution
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Pendidikan Terakhir : S-1
- d. Jabatan : Arsiparis Muda dan Subkoordinator di Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi, dan Umum
- e. Unit Kerja : Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi, dan Umum
- f. Hari, tanggal : Rabu, 7 April 2021
- g. Waktu : 13.30-14.30

2. Wawancara

Pertanyaan	Jawaban
Assalamuálaikum, terima kasih sudah bersedia menjadi informan dalam Penelitian saya dalam rangka penyusunan tesis. Penelitian saya berjudul "Analisis Persepsi Pegawai terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di LKPP" yang akan membahas terkait delapan area perubahan dan pada	Waálaikumussalam

Pertanyaan	Jawaban
wawancara ini terkait persepsi yang menyangkut bagaimana mendapatkan informasinya, pemahamannya, dan penilaiannya.	
1. Definisi Reformasi Birokrasi	
Pernahkah mendengar istilah Reformasi Birokrasi?Bolehkah menceritakan lebih detail?	Pertama kali mendengar sudah sejak jaman reformasi tahun 1998, kalo mendengar sedikit kontennya substansinya mungkin baru tahun 2015 sering digaungkan tentang reformasi birokrasi
Berdasarkan pemahaman, apa yang dimaksud dengan Reformasi Birokrasi?	Kalo secara bahasan, berarti merombak Kembali birokrasi untuk mencapai tujuan bernegara, kalo menurut istilah untuk tujuan K/L/PD itu ditetapkan. Misalkan LKPP tujuannya dibentuk untuk membuat kebijakan pengadaan barang/jasa
2. Manajemen Perubahan	
Pernahkah mendengar istilah tentang manajemen perubahan?	Pernah dengar ketika KemenPAN RB akan dating, kebetulan saya tidak pernah menjadi Tim Reformasi Birokrasi, sejak tahun 2020, oh ini maksudnya ada 8 area perubahan
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan manajemen perubahan itu seperti apa?	Kalo definisi yang jelas perubahan selalu ada, bagaimana perubahan itu selalu dikelola untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan

Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Reformasi Birokrasi didengungkan ketika KemePAN RB akan datang setelah itu tenggelam Kembali, dari BUK biasanya yang datang Angga Lingga kalo dari BUK. Implementasi di LKPP bagaimana BPK melakukan perubahan, sekarang POK pun disesuaikan dengan remstra, biasanya renstra dengan POK tidak inline, sekarang bagaimana renstra inline dengan POK untuk mencapai tujuan organisasi. Hasil di kearsipan tahun 2020 nilainya baik nilainya sekitar 85, kalau secara keseluruhan tidak tahu, kalau keseluruhan belum keluar
3. Deregulasi Kebijakan	
Pernahkah mendengar tentang deregulasi kebijakan?	Pernah dengar
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan deregulasi kebijakan itu seperti apa?	Berhubungan dengan perubahan kebijakan-kebijakan
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Yang terbaru Perpes baru Perpres 12 Tahun 2021, dan terbaru untuk mengakomodir omnibuslaw, ada kemungkinan juga Perpres 12 juga akan ada perubahan, dan waktu dilakukan sosialisasi bahan Perpres udah jadi tinggal diberi nomor sudah di tandatangan, ada perbaikan

Pertanyaan	Jawaban
	redaksi, ada beberapa definisi yang akan membuat bingung, contohnya penggunaan istilah untuk jaminan pelaksanaan diambil dari nilai kontrak. Kalau untuk kondisi saat ini tidak terlalu cepat juga karena harus sesuai dengan tuntutan, jika tidak mengikuti perubahan malahan Perpres tentang PBJ yang akan ketinggalan, menyesuaikan dengan kondisi, jika diperlukan perubahan ya harus dilakukan perubahan
4. Penataan Organisasi	
Pernahkah mendengar istilah tentang penataan organisasi?	Pernah dengar sejak tahun 2014
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan manajemen perubahan itu seperti apa?	Penyederhanaan organisasi
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Ketika Menyusun renstra tahun 2019 patokannya masih SOTK 2017 tentang penataan organisasi dan tat laksana, dan tidak sampe setahun ada kabar harus diubah lagi, karena dengan adanya penyetaraan jabatan fungsional. Realita yang ada pelaksanaannya disesuaikan dengan perencanaan dinilai tidak pas, buktinya kalo di SOTK tidak ada eselon 3 dan eselon 4, tapi sekarang sudah jabfung rasa struktural, kejaannya

Pertanyaan	Jawaban
	daouble, tapi tunjangannya lebih kecil, tunjangan fungsional belum dibayar dalam gaji pokok, yang sekarang baru dibayar tunjangan kinerja sesuai dengan tunjangan jabatan. Tunkin-nya sama yang bed aitu mestinya tunjangan jabatannya.
5. Penataan Tata Laksana	
Pernahkah mendengar istilah tentang penataan tata laksana?	Pernah dengar tahun 2014
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan penataan tata laksana itu seperti apa?	Terkait SOP
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Banyak SOP-SOP yang sudah disusun di setiap unit kerja di LKPP
6. Penataan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	
Pernahkah mendengar istilah tentang penataan SDM Aparatur?	Sering dengar

Pertanyaan	Jawaban
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan SDM Aparatur itu seperti apa?	Peningkatan kompetensi untuk di kualitas masing-masing
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Pelatihan ASN pertahun harus dapar pelatihan per tahun 20 JP, saya liat belum efektif mungkin dari segi anggaran, tapi bisa jadi tidak terlalu dari anggaran karena pelatihan dapat dilaksanakan secara daring. Unit kerja tertentu mereka sudah mengambil perannya kepegawaian untuk memningkat kompetensi pegawainya dari masing-masing unit kerja masing-masing, karena di kepegawaian terbatas dana dilkat di kepagawaian. Makanya kalo saya di anggran tahun 2022 sudah beragumen dari awal menambahkan kode akun untuk mengikuti pelatihan-pelatihan kompetensi untuk para jabfung karena instansi lain pelaksana kebanyakan sudah PNBK kita harus tetap bayar pelatihan. Jadi terkendala dari segi anggaran
7. Penguatan Akuntabilitas	
Pernahkah mendengar istilah tentang penguatan akuntabilitas?	Dengar istilahnya sudah mendengar sejak kuliah tahun 1999, tapi yang lebih sering dengar setiap KemenPAN RB akan datang ke LKPP
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud	Setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan

Pertanyaan	Jawaban
dengan penguatan akuntabilitas itu seperti apa?	yang belaku
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	SPSE sudah dilaksanakan secara elektronik salah satu untuk akuntabilitasnya. Akuntabilitas di LKPP sudah cukup lumayan disbanding 7 area perubahan yang lain
8. Penguatan Pengawasan	
Pernahkah mendengar istilah tentang penguatan pengawasan?	Sering dengar dari sejak jaman kuliah
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan penguatan pengawasan itu seperti apa?	-
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Dilakukan di Inspektorat
9. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
Pernahkah mendengar istilah tentang peningkatan kualitas pelayanan publik?	Sering dengar dari sejak jaman kuliah
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud	Pelayanan yang diberikan kepada seluruh stakeholder

Pertanyaan	Jawaban
dengan peningkatan kualitas pelayanan publik itu seperti apa?	
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Pelayanan SPSE yang terasa kali sangat transparan karena kelihatan sekali sekali ya.
10. Strategi apa yang seharusnya dilakukan oleh pegawai LKPP untuk mendukung perbaikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan LKPP?	Kelebihannya setiap tahun selalu berusaha meningkatkan peningkatan nilai Reformasi Birokrasi adapun kelemahannya ternyata kita terlalu terpaku ke delapan area perubahan ini, walaupun pekerjaannya juga masih banyak yang miss, contoh eselon 3 ke bawah menempati posisinya dalam jangka waktu yang lama, padahal di UU ASN maksimal 5 tahun diperparah lagi kondisi sekarang di jabfungkan akan lebih susah lagi untuk berotasi di suatu jabatan. Walaupun kemaren KemenPAN akan merubah Peraturan Pemerintah sesuai dengan kondisi yang ada untuk mempermudah melakukan <i>inpassing</i>. Bisa saja menurut kita bagus, sedangkan dari penilai belum, bisa jadi banyak yang sudah dilakukan tetapi tidak termasuk dipenilaian di delapan area perubahan tersebut. Mungkin saja penilaian beum tentu yang belum kita rasakan manfaatnya. Misalkan saja galakkan rotasi

Pertanyaan	Jawaban
	mungkin saja itu nilainya besar, tetapi di kita jarang sekali dilakukan. Strategi yang muncul dari individu sepertinya susah, karena banyak teman-teman kita banyak yang motivasinya turun. Banyak dari yang sejak dilantik jabfung, tetapi sampai sekarang belum memikirkan angka kreditnya. Kalo dari LKPP dari Kepala LKPP yang langsung men-<i>lead</i> terkait Reformasi Birokrasi, karena selama ini di <i>lead</i> dari BPOT bagaimana caranya meningkatkan delapan area perubahan, alangkah lebih baik jika ada arahan langsung dari kepala LKPP

Transkrip Wawancara Penelitian Informan KI 3.1
Analisis Persepsi Pegawai Terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1. Informan

- a. Nama : Yosi Febriani
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. Pendidikan Terakhir : S-2
- d. Jabatan : Widyaiswara Pertama Pusdiklat PB
- e. Unit Kerja : Pusdiklat PBJ LKPP
- f. Hari, tanggal : Senin, 5 April 2021
- g. Waktu : 11.00-12.00 WIB

2. Wawancara

Pertanyaan	Jawaban
Assalamuálaikum, terima kasih sudah bersedia menjadi informan dalam Penelitian saya dalam rangka penyusunan tesis. Penelitian saya berjudul "Analisis Persepsi Pegawai terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di LKPP" yang akan membahas terkait delapan area perubahan dan pada	Waálaimusalam, iya boleh mbak

Pertanyaan	Jawaban
wawancara ini terkait persepsi yang menyangkut bagaimana mendapatkan informasinya, pemahamannya, dan penilaiannya.	
1. Definisi Reformasi Birokrasi	
Pernahkah mendengar istilah Reformasi Birokrasi?Bolehkah menceritakan lebih detail?	Alhamdulillah pernah, kebetulan sekaranga menjadi narahubung Reformasi Birokrasi untuk Pusdiklat Pengadaan Barang/Jasa (PBJ). Pernah denger Ketika kampanye Presiden dan Wapres sebelum masuk ke LKPP sekitar tahun 2014, itu hanya mendengar istilahnya saja belum mengerti apa artinya. Cuma Taunya reformasi itu adalah bentuk dari suatu perubahan dari lingkungan belum dari website.
Berdasarkan pemahaman, apa yang dimaksud dengan Reformasi Birokrasi?	Tindakan perubahan tata kelola pemerintahan, jelasinnya juga bingung, istilah tata kelola lebih ke proses Tindakan perubahan untuk menciptakan pengadaan barang/jasa ke arah yang lebih baik
2. Manajemen Perubahan	
Pernahkah mendengar istilah tentang manajemen perubahan?	Pernah dengar sekarang-sekarang ketika jadi narahubung Reformasi Birokrasi sekarang tahun 2021
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud	Kalo manajemen masih meraba-raba Reformasi Birokrasi itu bagaiman,

Pertanyaan	Jawaban
dengan manajemen perubahan itu seperti apa?	kalo misalnya manajemen perubahan, nanti lagi mbak sambal dipikirkan dulu
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Terdapat Tim Reformasi Birokrasi, renaksi dari setiap unit kerja, dan ada agen perubahan
3. Deregulasi Kebijakan	
Pernahkah mendengar tentang deregulasi kebijakan?	Pernah dengar sejak jadi PNS tahun 2019, mungkin dulu pernah dengar tapi belum ngeh karena belum kerja di pemerintahan
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan deregulasi kebijakan itu seperti apa?	Regulasi itu saja sebenarnya sudah merupakan kebijakan, jadi deregulasi kebijakan merupakan perubahan kebijakan-kebijakan
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Implementasi di LKPP kayanya perubahan kebijakan merupakan hal yang rentan, misalnya Perpres 16 Tahun 2018 sekarang sudah diganti menjadi Perpres Nomor 12 Tahun 2021, umurnya pendek-pendek demikian juga dengan perlem-perlemnya juga umurnya pendek-pendek sudah dilakukan perubahan lagi, kalo itu pandangan dari saya hal tersebut merupakan hal yang rentan. Mungkin kitanya juga dituntut untuk segera melakukan update. Kekurangannya baru tahu ada Perpres, tapi sekarang sudah berubah walaupun tidak secara keseluruhan hanya

Pertanyaan	Jawaban
	sebagian, kadang sebagian orang berpikir peraturan lama sudah tidak berlaku padahal masih berlaku. Posisinya peraturan sesuai dengan tuntutan terkini.
4. Penataan Organisasi	
Pernahkah mendengar istilah tentang penataan organisasi?	Pernah denger sejak jadi narahubung Reformasi Birokrasi tahun 2021, tetapi di LKPP ada unit kerja tersendiri ada unit kerja yang khusus membahas penataan organisasi, dulu di BPOT sekarang di BHOSDM
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan penataan organisasi itu seperti apa?	Kalo dibilang kegiatan bukan kegiatan juga tapi bisa juga, kegiatan agar organisasinya lebih terstruktur, kemudian ada regulasi-regulasi tentang organisasinya seperti apa
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Salah satunya pembentukan jabfung-jabfung menyikapi arahan presiden, dilakukannya restrukturisasi organisasi dengan adanya jabfung BPOT berubah jadi BHOSDM. Penataan organisasi sesuatu yang harus, kalo tidak ada organisasinya mau dibawa kemana. Menurut pendapat pribadi, kemaren dengan adanya knowledge sharing dengan LAN sebaiknya ada Pusbin, dibilang bukan kekurangan tapi lebih tepatnya untuk memberikan masukan, udah disampaikan sebagian tata organisasi tetapi masih belum berubah.

Pertanyaan	Jawaban
5. Penataan Tata Laksana	
Pernahkah mendengar istilah tentang penataan tata laksana?	Pernah dengar ketika jadi narahubung reformasi Biokrasi
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan penataan tata laksana itu seperti apa?	Pengaturan pelaksanaan kegiatan yang lebih teknis
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Seperti tadi implementasinya seperti SOP Lebih ke pengaturan seperti SOP, ada standar dalam pekerjaan, perubahan adanya digitalisasi dalam pekerjaan seperti persuratan. Terkait persuratan harus terdokumentasi terkait persurat sudah ada di eoffice, tetapi ada bentuk memorandum dalam tata naskah dinas itu tetapi belum tercover dalam eoffice, untuk persuratan intern tidak ada dari coordinator ke coordinator tidak mengerti apakah belum disempurnakan dan belum ada penomoran, sedangkan dari segi penomoran sekarang sudah otomatis dari sistem
6. Penataan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	
Pernahkah mendengar istilah tentang penataan	Pernah dengar dari SMA atau kuliah terkait dengan Sumber Daya

Pertanyaan	Jawaban
SDM Aparatur?	Manusia (SDM), tv, baca-baca berita
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan SDM Aparatur itu seperti apa?	Pengelolaan SDM-nya seperti apa terkait dengan regulasinya seperti apa, pengembangan kompetensi seperti apa
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Di LKPP yang jabfung-jabfung, mengikuti arahan Presiden lebih banyak jabfung-jabfung apakah itu terpaksa atau tidak tapi mengikuti arahan Presiden, sudah ada peningkatan kompetensi pegawai, ABK, uraian jabatan, penempatan jabfung. Dari kacamata pribadi, penjabfungannya sendiri masih terjadi kebingungan-kebingungan tersendiri, kita sendiri belum siap dari segi organisasinya, jabfung salah satunya harus mengumpulkan angka kredit, istilahnya seperti makanan Cuma satu tapi yang makan banyak, pasti akan lebih mementingkan pekerjaan-pekerjaan untuk mengumpulkan angka kredit. Bentuk struktur organisasinya saja kita belum siap. Butuh waktu tidak untuk gelondongan jadi jabfung. Keefektifan belum bisa dilihat karena baru 2 tahun penyesuaian, mungkin bisa dilihat dalam 3-5 tahun ke depan. Kalo di daerah ada eselonisasinya sampe eselon 5, mungkin dipangkas hanya eselon 5 dan 4 sedangkan eselon 3 masih tetap ada.

Pertanyaan	Jawaban
7. Penguatan Akuntabilitas	
Pernahkah mendengar istilah tentang penguatan akuntabilitas?	Pernah dengan mbak, sejak jadi CPNS dan baru ngeh,
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan penguatan akuntabilitas itu seperti apa?	Akuntabilitas itu bagaimana kita bertanggungjawab atau bnetuk pertanggungjawaban kegiatan
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Dari segi anggaran, regulasi, pemenuhan renstra kemudian turun ke unit yang paling kecil dan masih berhubungan dengan anggaran, bentuk pengendaliannya dalam bentuk laporan bulanan, Laporan Kinerja Tahunan (LKJ), dari segi akuntabilitasnya sudah oke, sudah seoptimal mungkin lebi efektif.
8. Penguatan Pengawasan	
Pernahkah mendengar istilah tentang penguatan pengawasan?	Pernah dengar penguatan pengawasan pas jadi CPNS, karena dulu <i>attention</i> tidak ke pemerintahan.
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan penguatan pengawasan itu seperti apa?	Pengawasan merupakan bentuk laporan kegiatan termasuk pengawasan anggaran
Bagaimana penilaiannya terhadap	Salah satunya inspektorat

Pertanyaan	Jawaban
pelaksanaannya di LKPP?	
9. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
Pernahkah mendengar istilah tentang peningkatan kualitas pelayanan publik?	Sudah dengar dari lama dari jaman sekolah waktu kuliah dari percakapan, dari kuliah umum, kalo ngurus-ngurus surat pasti selalu ada pelayanan public, dari website juga bisa.
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan peningkatan kualitas pelayanan publik itu seperti apa?	Bentuk kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat luas yang menggunakan jasa kita
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Kalo di Pusdiklat misalnya seperti pelayanan pelatihan, pelayanan akreditasi, dari segi Pusdiklar sudah bagus sudah oke. Kita juga ujung-ujunga berhubungan dengan pembuatan bahan ajar atau modul. Sejauh ini sudah mencoba secara maksimal, belum optimal mungkin karena keterbatasan anggaran dan SDM. Apalagi dari segi materi sangat rentan karena berhubungan dengan perubahan regulasi, mungkin jadinya agak kewalahan, dan materi akan dipakai di seluruh Indonesia.
10. Strategi apa yang seharusnya dilakukan oleh pegawai LKPP untuk mendukung perbaikan	Nilai Reformasi Birokrasi belum signifikan dikarenakan: Saya gak tau ini kalo penilaian se-LKPP, mungkin belum semuanya

Pertanyaan	Jawaban
pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan LKPP?	terinternalisasi tentang Reformasi Birokrasi dan juga belum semuanya beradaptasi dengan perubahan, karena tiap tahun selalu ada di tambah lagi load pekerjaan masing-masing personal yang tinggi. Strateginya: bentuk internalisasinya dibuat lebih kuat, contohnya dalam penyusunan renstra ada Tim renstra, ketika nanti renstra sudah jadi harusnya ada bentuk internalisasi. Target yang hafal hanya di unit kerjanya masing-masing tapi mungkin kalo se-LKPP tidak tahu karena fokus ke masing-masing di unit kerjanya. Bentuk internalisasi mungkin didelegasikan ke eselon 2-nya hanya baru Pusdiklat tapi untuk LKPP belum ada. Mungkin berpikir sudah ada di JDIH itu sudah cukup, tapi kadang nggak aware, menurut saya kalo hanya di JDIH kurang efektif, karena mungkin yang tahu hanya PIC-nya saja. Sosilasinya juga dapat berupa banner atau mungkin ketika masuk website di LKPP ketika awal masuk langsung ada teks awal terkait Reformasi birokrasi, harus ada kerja sama dari semua pihak.

Transkrip Wawancara Penelitian Informan KI 3.2
Analisis Persepsi Pegawai Terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1. Informan

- a. Nama : Yoga Nurdani
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Pendidikan Terakhir : S-1
- d. Jabatan : Jabatan Fungsional Umum/Staf PNS
- e. Unit Kerja : Pusdiklat PBJ
- f. Hari, tanggal : Rabu, 7 April 2021
- g. Waktu : 16.00-17.00

2. Wawancara

Pertanyaan	Jawaban
Assalamuálaikum, terima kasih sudah bersedia menjadi informan dalam Penelitian saya dalam rangka penyusunan tesis. Penelitian saya berjudul "Analisis Persepsi Pegawai terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di LKPP" yang akan membahas terkait delapan area perubahan dan pada	Waálaikumussalam Mbak

wawancara ini terkait persepsi yang menyangkut bagaimana mendapatkan informasinya, pemahamannya, dan penilaiannya.	
1. Definisi Reformasi Birokrasi	
Pernahkah mendengar istilah Reformasi Birokrasi?Bolehkah menceritakan lebih detail?	Di LKPP dari tahun 2018 sekitar 4 tahun, pas masih CPNS dulu ada survey Reformasi Birokrasi bhasanya dikumpukan di lantai 2 untuk mengisi survey Reformasi Birokrasi, pamphlet-pamlet atau brosur-brosur Reformasi Birokrasi, belum CPNS kerja di swasta di PT Jojonimik Indonesia bagian finansial teknologi, tahu pertengahan tahun 2018 tahu langsung dari lingkungan di LKPP
Berdasarkan pemahaman, apa yang dimaksud dengan Reformasi Birokrasi?	Dimasyarakat tau tentang pemerintahan kerja PNS kerjanya lama, berbelit-belit. Reformasi Birokrasi untuk mengembalikan citra PNS menjadi citra yang baru yang lebih baik, kualitas kerjanya bagus, memiliki pegawai yang kompeten
2. Manajemen Perubahan	
Pernahkah mendengar istilah tentang manajemen perubahan?	Tau area perubahan tahun 2019 sejak menjadi Tim Reformasi Birokrasi (RB) Pusdiklat, tau dari sosialisasi dari BPOT untuk para Tim RB kemudian diminta membuat rencana aksi

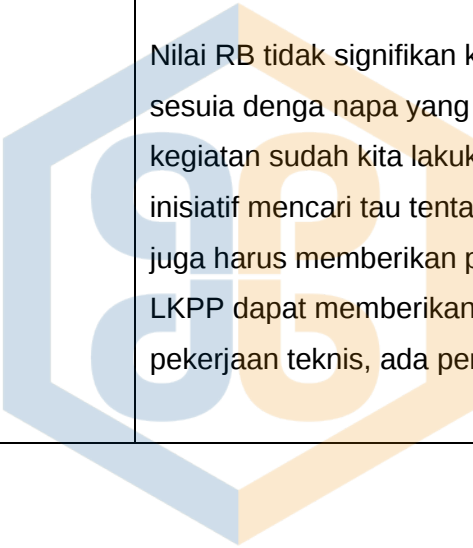
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan manajemen perubahan itu seperti apa?	Kegiatan yang terstruktur untuk mengubah budaya kerja yang tadinya buruk atau belum sesuai menjadi budaya kerja yang baik
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Manajemen perubahan di LKPP sudah terlaksana karena tiap tahun merancang rencana aksi sudah melaksanakan perubahan walaupun belum besar, contoh mensosialisasikan nilai-nilai budaya kerja di LKPP. Pelaksanaannya perlu ditingkatkan lagi mungkin terdengarnya ketika akan dilakukan penilaian dari PermenPAN RB, untuk sehari-hari kurang terdengar.
3. Deregulasi Kebijakan	
Pernahkah mendengar tentang deregulasi kebijakan?	Tahun 2019 pas jadi Tim RB, kemudian ada omnibuslaw dulu bukan deregulasi kebijakan ketika ada omnibuslaw istilahnya jadi deregulasi kebijakan
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan deregulasi kebijakan itu seperti apa?	Setiap Instansi mempunyai regulasi masing-masing, mungkin ada regulasi yang bertubrukan, deregulasi fungsinya untuk memangkas kebijakan-kebijakan yang bentrok, menjadi inline dengan tujuan-tujuan
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Misal di Pusdiklat ada rencana menyatukan kebijakan di pelatihan dan di sertifikasi tetapi belum terlaksana, ini butuh arahan dari pimpinan, beda pimpinan berbeda lagi kebijakan karena ada pergantian pimpinan

4. Penataan Organisasi	
Pernahkah mendengar istilah tentang penataan organisasi?	Tahun 2019
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan penataan organisasi itu seperti apa?	Susunan organisasi, menghadapi jaman yang sudah berubah sudah ada tantangan-tantangan baru diperlukan susunan organisasi yang tepat
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Misal di Pusdiklat ada yang <i>me-lead Knowledge Management System (KMS)</i> , tetapi kotak organisasinya terbatas padahal sebenarnya diperlukan ada kotak lebih. Pelaksanaan di internal sudah cukup bagus, tapi untuk implementasinya yang masih agak susah.
5. Penataan Tata Laksana	
Pernahkah mendengar istilah tentang penataan tata laksana?	Tahu tahun 2019 ketika jadi Tim RB Pusdiklat PBJ, tahunya dari baca dari peraturan PermenPAN RB dan dari sosialisasi ke Tim RB
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan penataan tata laksana itu seperti apa?	Berhubungan dengan penataan pelaksanaan sehari-sehari, seperti proses bisnis
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Seperti membuat kajian PNBP di Pusdiklat PBJ, SOP-SOP yang disusun. Dengan banyaknya SOP di LKPP terlalu punya SOP yang kecil-kecil dan rijit, sebelumnya infonya saran dari BPOT harus detail seperti

	itu, contohnya SOP tentang keuangan seharusnya kita tidak usah membuat SOP keuangan lagi, cukup menyadur dari SOP di Bagian Keuangan, belum efektif. Pengawasan SOP masih lemah, sebaiknya dilaksanakan monitoring-monitoring jika ada yang tidak sesuai dengan SOP dikoordinasikan dengan pimpinan yang lebih tinggi
6. Penataan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	
Pernahkah mendengar istilah tentang penataan SDM Aparatur?	Istilah SDM dari SMA sudah tahu, tapi kalo penataan SDM di Reformasi Birokrasi tahu tahun 2019 ketika jadi Tim RB
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan SDM Aparatur itu seperti apa?	Membekali kompetensi SDM sesuai dengan kebutuhan SDM tersebut di lapangan dan sesuai dengan waktu kebutuhannya
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Dari tahun ke tahun terjadi penurunan karena terbentur anggaran, tetapi sudah dicoba dengan misalnya kenduri ilmu, sharing session, di Pusdiklat juga mengadakan knowledge sharing. Karena SDM adalah aset sehingga sebaiknya didahulukan, tetapi jangan asal memilih pelatihan
7. Penguatan Akuntabilitas	

Pernahkah mendengar istilah tentang penguatan akuntabilitas?	Tahun pas CPNS pelatihan pengadaan barang/jasa, tapi yang berhubungan dengan Reformasi Birokrasi tahun 2019
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan penguatan akuntabilitas itu seperti apa?	Meningkatkan nilai akuntabilitas mulai dari individu sampai tingkat lembaga agar <i>fraud</i> atau korupsi bisa diminimalisir setiap tahunnya
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Implementasinya di LKPP, kalo di Pusdiklat sendiri akuntabilitasnya sudah bagus, tidak ada yang melanggar akuntabilitas khususnya untuk mempaerkaya diri sendiri tidak ada, kemudian pengaduan-pengaduan sudah dapat direspon dengan baik juga, memiliki berbagai chanel untuk pengaduan-pengaduan dan selalu ditindaklanjuti, sudah bagus
8. Penguatan Pengawasan	
Pernahkah mendengar istilah tentang penguatan pengawasan?	Tahu sejak jadi Tim RB tahun 2019
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan penguatan pengawasan itu seperti apa?	Kegiatan untuk memonitoring kerja yang dilakukan sesuai dengan kebijakan, SOP, atau panduan yang telah ditetapkan
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Di LKPP pengawasan SOP masih belum efektif masih umpamanya masih win-win solution, misalnya pengajuan pelatihan ketika ada perubahan pelatihan misal h-4 pelatihan, tapi ketika ada yang mau

	berubah h-2 juga difasilitasi, karena mungkin untuk tetap melakukan pelayanan
9. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
Pernahkah mendengar istilah tentang peningkatan kualitas pelayanan publik?	Tahu ketika menjadi Tim RB tahun 2019
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan peningkatan kualitas pelayanan publik itu seperti apa?	Layanan yang dilakukan sebelumnya ditingkatkan terus kualitasnya agar masyarakat tidak disusahkan dalam mengakses pelayanan yang kita berikan, kan kita dibayar negara untuk melaksanakan pelayanan publik, agar masyarakat mendapatkann pelayanan yang baik
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Implementasi pelayanan publik untuk Pusdiklat ada inovasi tahun 2019 ada <i>blended learning</i> , tahun 2020 ada <i>MOOC</i>
10. Strategi apa yang seharusnya dilakukan oleh pegawai LKPP untuk mendukung perbaikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan LKPP?	Kalo menjadi PIC tahun 2019 belum melihat guide line utama dari Reformasi Birokrasi, sampe sekarang saya merasa rencana aksi dari unit kerja masih belum jelas, bagaimana rencana aksi sinkron ke unit lembaga. Secara tidak langsung semua area perubahan sudah dilakukan oleh LKPP, mungkin pendokumentasiannya belum sesuai dengan yang MenPAN mau.



	Nilai RB tidak signifikan karena mungkin pendokumentasiannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan MenPAN RB, menurut saya semua kegiatan sudah kita lakukan. Sebagai individu memang harus secara inisiatif mencari tau tentang Reformasi Birokrasi, dan dari lembaganya juga harus memberikan pedoman tentang Reformasi Birokrasi. Dari LKPP dapat memberikan guideline dan dibikin juga sehari libur dari pekerjaan teknis, ada pemberi pengetahuan tentang Reformasi Birokrasi
--	---

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Transkrip Wawancara Penelitian KI 3.3
Analisis Persepsi Pegawai Terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1. Informan

- a. Nama : Setiaji
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Pendidikan Terakhir : S-1
- d. Jabatan : Jabatan Fungsional Umum/Staf PNS Pusdiklat PBJ
- e. Unit Kerja : Pusdiklat PBJ
- f. Hari, tanggal : Rabu, 31 Maret 2021
- g. Waktu : 15.00-16.00

2. Wawancara

Pertanyaan	Jawaban
Assalamuálaikum, terima kasih sudah bersedia menjadi informan dalam Penelitian saya dalam rangka penyusunan tesis. Penelitian saya berjudul “Analisis Persepsi Pegawai terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di LKPP” yang akan membahas terkait delapan area	Baik Mbak, sama-sama, silakan

Pertanyaan	Jawaban
perubahan dan pada wawancara ini terkait persepsi yang menyangkut bagaimana mendapatkan informasinya, pemahamannya, dan penilaiannya.	
1. Definisi Reformasi Birokrasi - Kapan mendengar istilah Reformasi Birokrasi?	Sebelum menjadi CPNS sudah mendengar tentang Reformasi Birokrasi satu tahun ke belakang, saya sering mendaftar tes CPNS, yang menjadi penilaian adalah birokrasi jika di Pemerintah. Saya CPNS tahun 2019.
2. Manajemen Perubahan -Pernahkah mendengar istilah tentang manajemen perubahan?	Kalo saya secara umum pasti manajemen arti secara umum, Cuma tau tentang manajemen aja, pasti manajemen berhubungan dengan birokrasi, pernah denger istilah manajemen perubahan sekitar pas jadi CPNS, manajemen perubahan pasti ada dalam Reformasi Birokrasi, tau juga dari website, sesuatu hal baru biasanya saya langsung cari dari website, tetapi belum pernah ikut pelatihan.
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan manajemen perubahan itu seperti apa?	Manajemen artinya mengatur mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi. Bagaimana perubahan itu terlaksana sesuai dengan perencanaan, tentunya nanti dievaluasi apakah perubahan itu sesuai

Pertanyaan	Jawaban
	dengan perencanaan, kalo di kit akita sering disebut dengan KAK dan RAB.
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Manajemen perubahan di LKPP menurut saya Kembali lagi ke Perpres 12 Tahun 2021 pastinya LKPP berusaha melakukan perubahan mungkin dituangkan dalam Perlem-perlem, itu menurut saya mbak contohnya. Tentunya LKPP harus diimplementasikan dengan sungguh-sungguh karena Perlem itu akan menjadi pedoman/acuan. LKPP harus memberikan sosialisasi kepada pegawai sebagai pengetahuan atau pemberitahuan.
3. Deregulasi Kebijakan -Pernahkah mendengar tentang deregulasi kebijakan?	Belum pernah dengar tentang deregulasi kebijakan, di website pun belum, kalo kebijakan pernah terkait kebijakan, tapi kalo deregulasi baru pernah denger. Kalo istilah kebijakan sudah mendengar 2 tahun yang lalu dari pengalaman kerja sering dengar tentang kebijakan yang sering berubah.
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan deregulasi kebijakan itu seperti apa?	Menurut saya, deregulasi kebijakan benar-bener belum tau, tapi yang tersirat tidak jauh berbeda dengan perubahan peraturan kebijakan menuju ke arah yang lebih baik
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Yang masih sebar adanya perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ke Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang salah satunya didapat masukan dari serap aspirasi dari masyarakat. Dengan adanya aspirasi masyarakat LKPP mampu memperbaiki peraturan yang benar-

Pertanyaan	Jawaban
	benar menggambarkan aspirasi dari masyarakat, dan belum ada langkah lain belum ada inovasi lain yang dilakukan sepengetahuan saya.
4. Penataan Organisasi	
Pernahkah mendengar istilah tentang penataan organisasi?	Kalo penataan sering dengar dan organisasi juga sering dengar dan tau lewat internet
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan manajemen perubahan itu seperti apa?	Tujuan khususnya kepada penguatan organisasi, istilahnya lebih dipakai pada penyelesaian masalah, untuk meningkatkan efisiensi organisasi agar organisasi menjadi tepat fungsi, efisien itu efektif.
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Di LKPP kalo tidak salah bulan lalu Februari di Deputi ada perombakan organisasi, yang intinya untuk memberikan efisiensi dan efektifitas bagi kinerja di LKPP, dan pelaksanaannya sudah tepat di LKPP. Untuk penguatan organisasi harus didukung oleh SDM Aparatur di LKPP dengan menciptakan SDM yang professional dan berkompeten, misalnya seseorang yang membuat kurikulum, maka pada pengajuan SDM ke BHSIK kualifikasinya harus sesuai termasuk sistem perekrutannya harus disesuaikan dan pelaksanaannya menurut sudah sesuai
5. Penataan Tata Laksana	

Pertanyaan	Jawaban
Pernahkah mendengar istilah tentang penataan tata laksana?	Belum pernah dengar, tetapi seperti tidak asing di telinga, baru mendengar sekarang
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan penataan tata laksana itu seperti apa?	Tujuan untuk meningkatkan teknologi, kita tahu pada era 4.0 semua serba digital, dengan adanya tata laksana yang berhubungan dengan teknologi tentunya akan memberikan efek efisien di dalam manajemen Lembaga itu sendiri
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Pelaksanaan tata laksana di LKPP sudah bagus, terbukti dengan adanya eoffice merupakan perubahan yang sangat besar, dengan adanya wabah covid, sangat mendukung dalam persuratan, menurut saya ini merupakan langkah yang sudah bagus untuk efisiensi dan efektifitas. Tetapi beberapa kali mendapatkan eoffice yang bugs karena hanya bisa dipakai di mozilla. Perbaikannya tentunya setiap bulan dari sistem informasi karena terkait dengan kalatog dan LPSE, sebaiknya dilakukan maintenance jika sebelumnya seminggu sekali, mungkin bisa dilakukan menjadi 3 hari sekali.
6. Penataan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	
Pernahkah mendengar istilah tentang penataan SDM Aparatur?	Mungkin tadi yang saya singgung ya mbak, pernah denger mbak, dari HRD Ketika bekerja di perusahaan swasta sebelum masuk ke LKPP, tau dari

Pertanyaan	Jawaban
	percakapan sehari-hari.
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan SDM Aparatur itu seperti apa?	Penataan SDM lebih ke penataan manajemen lebih sistem rekrutmen, pelaksanaan sampai evaluasi bisa dilakukan setiap 6 bulan sekali atau setahun sekali untuk penilaian kinerja suatu sumber daya. Karena manajemen itu suatu output dari evaluasi kinerja.
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Penataan SDM di LKPP sudah bgaus ini dapat dilihat Ketika ada lowongan di LKPP Ketika ditempatkan di LPSE lihat dari pengalaman kerja di IT atau di Pusdiklat Ketika di Program dan Kurikulum pasti dilihat dari pengalaman, pasti ada kriteria atau persyaratan. Untuk kelebihanannya Ketika LKPP merekrut SDM itu semua informasi dapat cepat tersampaikan melalui email atau Instagram lebih transparan, sedangkan kalo kekurangan bisa dilihat dari CPNS kemaren lebih ke regulasi, kemaren masih saat covid, temen-temen yang tidak lulus mengeluh Ketika ada kenaikan ambang batas SKB yang diumumkan mendadak.
7. Penguatan Akuntabilitas	
Pernahkah mendengar istilah tentang penguatan akuntabilitas?	Sering saya dengar Ketika belajar Perpres salah satu prinsip pengadaan itu akuntabilitas, dengar pas masuk ke LKPP sebelumnya pernah dengar.

Pertanyaan	Jawaban
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan penguatan akuntabilitas itu seperti apa?	Akuntabilitas lebih ke peningkatan akuntabilitas suatu Lembaga melihat dari target yang ingin dicapai, tujuannya lebih ke bagaimana Ketika kita bekerja lebih ke ada suatu bukti kinerja ada peningkatanannya
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Penerapannya sudah bagus, yang sudah dilakukan di LKPP sudah dimulai dari hal-hal kecil seperti meeting atau FGD harus ada dokumentasinya atau buktinya.
8. Penguatan Pengawasan	
Pernahkah mendengar istilah tentang penguatan pengawasan?	Baru dengar sekarang, belum pernah dengar secara langsung, baru tahu kata penguatan dan pengawasan
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan penguatan pengawasan itu seperti apa?	Pengawasan itu pasti mengawasi, Ketika dalam pelaksanaan pemerintah pasti yang diinginkan adalah pemerintahan yang bebas dari KKN di suatu instansi pemerintah.
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Kalo di LKPP menurut saya sudah bagus, karena saya alami sendiri Ketika perwab-perwab honor narasumber harus ada bukti kegiatan, tidak jauh dari pengelolaan keuangan yang di bawah pengawasan BPK, dan Ketika berbicara pengawasan di LKPP pasti berhubungan dengan inspektorat. Dan jika ada sesuatu yang urgent inspektorat dengan cepat bertindak. Semua

Pertanyaan	Jawaban
	kegiatan yang di LKPP sudah bagus, contoh dapat dilihat jika ada penyalahgunaan kewenangan ada aplikasi yang tersedia di LKPP wbs.lkpp, itu kan suatu terobosan yang sangat bagus sudah serba digitalisasi
9. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
Pernahkah mendengar istilah tentang peningkatan kualitas pelayanan publik?	Kalo ini sering dengar mbak, tau sudah lama, mainset masyarakat Ketika berbicara pemerintah pasti birokrasi yang selalu ada pelayanan
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan peningkatan kualitas pelayanan publik itu seperti apa?	Pelayanan publik itu berkaitan dengan Reformasi Birokrasi, pelayanan publik lebih bertujuan untuk kualitas pelayanan public terhadap kebutuhan dari masyarakat. Kalau tidak salah LKPP selalu melihat adanya survey kepuasan Masyarakat (SKM) itu menjadi suatu terobosan dalam kualitas pelayanan publik
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Kelebihan dari pelaksanaan di LKPP kemaren sudah dilaksanakan serap aspirasi dari masyarakat menggali apa sih yang dibutuhkan masyarakat yang nantinya kana meningkatkan pelayan public di masyarakat
10. Strategi apa yang seharusnya dilakukan oleh pegawai LKPP untuk mendukung perbaikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di	Penyebab kenaikan RB di LKPP tidak mengalami kenaikan yang tidak signifikan: - Saya tidak tau penyebabnya, tapi kalo saya analisis tapi saya tidak

Pertanyaan	Jawaban
lingkungan LKPP?	begitu paham nilai RB itu berbicara tentang apa, tapi jika ada datanya bisa saya analisis. - Tukin bagus, kehadiran bagus belum tentu mengerti Reformasi Birokrasi, SDM secara tidak langsung mempengaruhi Reformasi Birokrasi Strategi - Untuk penguatan organisasi harus didukung oleh SDM Aparatur di LKPP dengan menciptakan SDM yang professional dan berkompeten, misalnya seseorang yang membuat kurikulum, maka pada pengajuan SDM ke BHSIK kualifikasinya harus sesuai termasuk sistem perekrutannya harus disesuaikan - Ketika ada penataan SDM terkait rekrutmen lebih memperbaiki atau perbaikan terus dalam rekrutmen, sistem penilaian kinerja - Harus berbenah diri lagi mungkin sistem LPSE, e-katalog contohnya, UKPBJ tiap provinsi juga semuanya harus intropeksi diri - Harus ada penataan SDM, harus berkompeten dan professional sesuai dengan bidangnya masing-masing, integritas, patuh, dan orientasi pada hasil dengan memperluas pengetahuan dengan mengikuti training-

Pertanyaan	Jawaban
	training. - Harus ada penataan organisasi sangat perlu untuk mengatasi suatu masalah yang ada di suatu Lembaga - Harus ada penataan perundang-undangan - Harus ada perbaikan juga penataan tata laksana

Transkrip Wawancara Penelitian Informan KI 3.4
Analisis Persepsi Pegawai Terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1. Informan

- a. Nama : Yohanes Chrisostomus
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Pendidikan Terakhir : S-1
- d. Jabatan : Jabatan Fungsional Umum/Staf CPNS
- e. Unit Kerja : Inspektorat
- f. Hari, tanggal : Senin, 5 April 2021
- g. Waktu : 18.30-19.30 WIB

2. Wawancara

Pertanyaan	Jawaban
Selamat malam, terima kasih sudah bersedia menjadi informan dalam Penelitian saya dalam rangka penyusunan tesis. Penelitian saya berjudul "Analisis Persepsi Pegawai terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di LKPP" yang akan membahas terkait delapan area perubahan dan pada	Selamat malam mbak

Pertanyaan	Jawaban
wawancara ini terkait persepsi yang menyangkut bagaimana mendapatkan informasinya, pemahamannya, dan penilaiannya.	
1. Definisi Reformasi Birokrasi	
Pernahkah mendengar istilah Reformasi Birokrasi?Bolehkah menceritakan lebih detail?	Pernah dengar, saya sendiri denger pas masuk PNS ke LKPP baru tahu ada Reformasi Birokrasi tepatnya tahun 2020, karena sebelumnya bekerja di swasta yaitu MNC, istilahnya berbeda dengan instansi swasta
Berdasarkan pemahaman, apa yang dimaksud dengan Reformasi Birokrasi?	Reformasi Birokrasi dilakukan Pemerintah sebagai upaya pemerintah punya pembaharuan atau <i>good government</i> , bisa lebih teratur lagi organisasinya, tata laksanaanya
2. Manajemen Perubahan	
Pernahkah mendengar istilah tentang manajemen perubahan?	Pernah dengar mulai waktu kerja di LKPP, setiap rapat terutama ketika membahas renstra Inspektorat
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan manajemen perubahan itu seperti apa?	Artinya kaya perubahan awal , system awal sebuah pemerintahan berubah menjadi lebih baik, sebuah manajemen memulai perubahan dari sistemnya
Bagaimana penilaiannya terhadap	Kalau menurut saya kaya mulai dari sistem-sistem etos kerja mulai dari

Pertanyaan	Jawaban
pelaksanaannya di LKPP?	munculnya eoffice, semua kaya ada backupnya dan historinya Salah satunya sudah diterapkan dalam bentuk aplikasi
3. Deregulasi Kebijakan	
Pernahkah mendengar tentang deregulasi kebijakan?	Belum pernah dengar tentang deregulasi kebijakan, kalau kata kebijakan sudah pernah dengar
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan deregulasi kebijakan itu seperti apa?	Berhubungan dengan regulasi-regulasi
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Kebijakan internal sudah mulai diterbitkannya SOTK yang baru, juga mengenai PBJ. Saya sendiri di Inspektorat juga mulai Menyusun draft LKHASN. Di LKPP selalu berupaya dalam melakukan perbaikan-perbaikan, supaya lebih ada dasar hukumnya. LHKPN dengan KPK, LHKASN dengan MenPAN, dasar hukum di LKPP yang belum ada sedangkan dari MenPAN-nya sudah ada
4. Penataan Organisasi	
Pernahkah mendengar istilah tentang penataan organisasi?	Sejak masuk LKPP tepatnya tahun 2020 atau 4 bulan yang lalu

Pertanyaan	Jawaban
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan penataan organisasi itu seperti apa?	Mungkin lebih ke pembaharuan SOTK-nya kita kali ya mbak agar LKPP bisa berjalan dengan efisien dan efektif
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Kita lebih mengarah ke peraturan pemerintah, mulai banyak diarahkan ke jabfung, memakai pihak ketiga dengan adanya jasa lainnya
5. Penataan Tata Laksana	
Pernahkah mendengar istilah tentang penataan tata laksana?	Pernah pas masuk CPNS
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan penataan tata laksana itu seperti apa?	Masih berkaitan dengan organisasi, proses bisnis di LKPP lebih berjalan lebih efektif dan efisien
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Proses bisnis mulai dibenahi
6. Penataan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	
Pernahkah mendengar istilah tentang penataan SDM Aparatur?	Dari awal CPNS lewat rapat-rapat, tapi istilah SDM sudah tahu sebelumnya sejak lulus kuliah tahun 2014

Pertanyaan	Jawaban
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan penataan SDM Aparatur itu seperti apa?	Ditetapkan kualifikasi-kualifikasinya untuk pegawai
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	SDM sebenarnya kaya proses rekrutmen di sebuah pemerintahan berjalan dengan baik dan terbuka, dulu ada isu kalo CPNS ada orang dalam dan sebagainya, di LKPP sendiri rekrutmen sudah transparan dan sudah mengikuti dari aturan PAN-RB
7. Penguatan Akuntabilitas	
Pernahkah mendengar istilah tentang penguatan akuntabilitas?	Sebelumnya sudah tau sejak kerja di swasta di MNC tahun 2014
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan penguatan akuntabilitas itu seperti apa?	Dapat meningkatkan kinerja kita sendiri dari Lembaga
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Dilakukan di Inspektorat mulai ada pembaharuan peta resiko, sehingga tau apa saja yang harus diperhatikan untuk mencapai renstra LKPP
8. Penguatan Pengawasan	

Pertanyaan	Jawaban
Pernahkah mendengar istilah tentang penguatan pengawasan?	Pernah dengar juga ketika masih bekerja di swasta
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud dengan penguatan pengawasan itu seperti apa?	Bagaimana lembaga tidak ada penyelewengan-penyelewengan
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Adanya WBS, ada laporan pelanggaran dari karyawan, ada satgas gratifikasi ada di setiap unit kerja di LKPP, tiap satgas sebagai leyer pertama jika ada gratifikasi di uke-nya, dapat diperoleh informasi dari dirinya sendiri tidak boleh memperoleh barang yang mengganggu integrasinya harus dilaporkan ke KPK, sebelum ke KPK dilaporkan ke satgas kemudian ke Inspektorat, harus ada kesadaran dari masing-masing orang. Sudah ada PP tentang gratifikasi, ke depannya akan sering disosialisasikan tentang gratifikasi.
9. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
Pernahkah mendengar istilah tentang peningkatan kualitas pelayanan publik?	Pernah dengar sejak dulu, mulai dari kita ngurus dari kelurahan kalau mengurus persuratan
Berdasarkan pemahaman yang dimaksud	Khususnya di Pemerintahan, kita kaya menerima pengurusan dari

Pertanyaan	Jawaban
dengan peningkatan kualitas pelayanan publik itu seperti apa?	masyarakat sejak dulu dianggap ribet, diharapkan ada standarnya yang sesuai
Bagaimana penilaiannya terhadap pelaksanaannya di LKPP?	Di LKPP sendiri. Kita benar-benar menciptakan pelayanan public secara online, kemudian juga ada survey artinya kita bisa kasih input/masukan
10. Strategi apa yang seharusnya dilakukan oleh pegawai LKPP untuk mendukung perbaikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan LKPP?	Kelebihannya LKPP termasuk yang cepat menjawab kebutuhan dan tantangan, LKPP cepat untuk masing-masing area perubahan, padahal LKPP merupakan lembaga yang baru 13 tahun berdiri. Kelemahannya terbentur di biaya/di belakang layer, anggarannya sedikit, bisa dibilang cukup menghambat. Sebenarnya LKPP sudah melakukan perubahan=perubahan, tetapi di mata MenPAN-RB masih kurang. LKPP mungkin kurangnya persiapan dari sejak awal. Kalo saya secara pribadi tetap berusaha memberikan input, bagaimana kita harus terlibat dan aktif jika ada kekurangan-kekurangan dalam penilaian Reformasi Birokrasi. Dapat berkaca dari nilai dari tahun lalu, kita bisa mempersiapkan lebih awal. Harus ada penggeraknya

Lampiran 19

**Hasil Observasi Penelitian Keseluruhan
Analisis Persepsi Pegawai Terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

No	Aspek-aspek yang Diamati	Keterangan
1	Pelaksanaan yang berkaitan dengan manajemen perubahan di LKPP	-Rapat pembahasan membuat rencana aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2021 dari setiap unit kerja
2	Pelaksanaan yang berkaitan dengan deregulasi kebijakan di LKPP	-Dilakukannya konsinyering perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa beserta turunannya -Dilakukannya serap aspirasi terhadap perubahan peraturan-peraturan
3	Pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan organisasi di LKPP	Pelantikan jabatan fungsional tertentu dari jabatan fungsional umum/staf PNS, menghilangkan eselon 3 dan eselon 4 menjadi jabatan fungsional tertentu
4	Pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan tata laksana di LKPP	-
5	Pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan SDM di LKPP	Adanya kesempatan kepada para pegawai untuk mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek)
6	Pelaksanaan yang berkaitan dengan penguatan akuntabilitas di LKPP	Adanya rapat pembahasan klarifikasi, tanggapan notisi, dan <i>exit meeting</i> reuiu penyerapan anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Triwulan I Tahun Anggaran 2021, pada tanggal 26

		April 2021
7	Pelaksanaan yang berkaitan dengan penguatan pengawasan di LKPP	- Evaluasi Kinerja Triwulan I yang dipimpin oleh Kepala LKPP, para eselon II, dan Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 8 April 2021 - Pusdiklat PBJ LKPP melakukan rapat pembahasan pemantauan, evaluasi, dan capaian kinerja Triwulan 1 di Pusdiklat PBJ
8	Pelaksanaan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik di LKPP	Memberikan pelatihan secara daring walaupun dalam masa pandemik, tetap memberikan pelayanan melalui zoom/online

POLITEKNIK
STIA LAN
 J A K A R T A

Lampiran 20

Hasil Telaahan Dokumen Keseluruhan
Analisis Persepsi Pegawai Terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

No	Area Perubahan	Dokumen
1	Pelaksanaan yang berkaitan dengan manajemen perubahan di LKPP	- Nilai Reformasi Birokrasi LKPP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tahun 2016 sampai dengan tahun 2019
2	Pelaksanaan yang berkaitan dengan deregulasi kebijakan di LKPP	- Nilai Reformasi Birokrasi LKPP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 - Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Peraturan LKPP turunan dari Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3	Pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan organisasi di LKPP	- Nilai Reformasi Birokrasi LKPP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 - Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP

No	Area Perubahan	Dokumen
4	Pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan tata laksana di LKPP	- Nilai Reformasi Birokrasi LKPP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 - SOP yang terdapat di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (Pusdiklat PBJ) LKPP
5	Pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan SDM di LKPP	- Nilai Reformasi Birokrasi LKPP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 - Rekapitulasi kehadiran PNS tahun 2020 - Nota dinas permohonan data pengembangan kompetensi pegawai LKPP
6	Pelaksanaan yang berkaitan dengan penguatan akuntabilitas di LKPP	- Nilai Reformasi Birokrasi LKPP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 - Laporan Kinerja LKPP tahun 2016 sampai dengan tahun 2020
7	Pelaksanaan yang berkaitan dengan penguatan pengawasan di LKPP	- Nilai Reformasi Birokrasi LKPP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 - Laporan penyampaian notisi hasil

No	Area Perubahan	Dokumen
		reviu penyerapan anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa di LKPP Triwulan I Tahun Anggaran 2021
8	Pelaksanaan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik di LKPP	- Nilai Reformasi Birokrasi LKPP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 - Laporan Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2016 sampai dengan tahun 2020

Dokumentasi Penelitian



Nomor : 461/STIA.1.1/PPS.02.3
Sifat : Biasa
Lampiran : Proposal Penelitian Tesis.
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa
Program Magister Terapan
Politeknik STIA LAN Jakarta

Jakarta, 1 April 2021

**Yth. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat)
Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)**

Komplek Rasuna Epicentrum Jl. Epicentrum Tengah,
Lot 11 B, Jakarta Selatan

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami :

Nama : Hestri Rokayah
NPM : 1964002018
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Sumber Daya Aparatur
Judul Tesis : Analisis Persepsi Pegawai Terhadap Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur
Wakil Direktur I Bidang Akademik,

Mala Sondang Silitonga

Tembusan :

1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Kajur Administrasi Publik;
3. Kaprodi Program Magister Terapan.



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

Gedung LKPP - Kompleks Rasuna Epicentrum
Jln. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan 12940
Telepon 021-2991 2450 (hunting) Faksimile 021-2991 2451 Website : www.lkpp.go.id

Nomor : 8617/Pusdiklat/04/2021 29 April 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian Mahasiswa
Program Magister Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta

Yth. **Wakil Direktur I Bidang Akademik Politeknik STIA LAN Jakarta
di Tempat**

Menindaklanjuti surat Wakil Direktur I Bidang Akademik Politeknik STIA LAN nomor:
461/STIA.1.1/PPS.02.3 tanggal 1 April 2021 perihal Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa Program
Magister Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta, dapat disampaikan informasi sebagai berikut:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gatot Pambudhi Poetranto
NIP : 196810121990111001
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya / IV/d
Jabatan : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
Unit Kerja : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Hestri Rokayah
NPM : 1964002018
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Sumber Daya Aparatur

Telah melaksanakan penelitian di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mulai
tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan 27 April 2021 untuk memperoleh data guna penyusunan
Tugas Akhir Tesis dengan judul "**Analisis Persepsi Pegawai Terhadap Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

J A K A R T A

Kepala Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Gatot Pambudhi Poetranto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : unTNSP
Nomor Tiket : SK202104290002

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Hestri Rokayah

Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 20 November 1983

Nomor Pokok Mahasiswa : 1964002018

Konsentrasi : Manajemen Sumber Daya Aparatur

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat Rumah : Jln. H. Bakrie Nomor 18 A RT 03 RW 04

Instansi : LKPP

Unit Kerja : Pusdiklat PBJ LKPP

Jabatan : Subkoordinator Program dan Kurikulum, WI Muda

Riwayat Pendidikan :

1. S1 Pendidikan Matematika UPI Bandung
2. SMA Negeri 2 Cimahi
3. SMP Negeri 1 Cimahi
4. SD Negeri Sawah Lega I

Pembimbing Tugas Akhir :

1. Yogi Suwarno, MA.Ph.D
2. Dr. Bambang Giyanto, M.Pd

Nama Ibu Kandung : Osih

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, Juli 2021

Hestri Rokayah